



PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



**Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul**

Tahun Anggaran 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan baik.

Secara garis besar, Buku Profil Kependudukan ini menyajikan tujuh bab pembahasan. Ketujuh bab tersebut meliputi: Pendahuluan; Gambaran Umum dan Inovasi Disdukcapil Kabupaten Bantul; Sumber Data; Profil Kuantitas Penduduk; Kualitas Penduduk; Kepemilikan Dokumen Kependudukan; dan ditutup dengan Kesimpulan/Penutup.

Adapun data yang digunakan sebagai basis penyusunan profil ini merujuk pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025, yang dipadukan dengan Data Pelayanan Pencatatan Sipil dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Mengingat peran vital data kependudukan dalam tata kelola pemerintahan, kami berharap buku profil ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan pijak dalam perumusan kebijakan strategis oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami senantiasa terbuka menerima kritik dan saran konstruktif dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian, guna perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan Buku Profil Kependudukan di masa mendatang.

Bantul, 4 Mei 2026
Kepala Dinas



Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos., M.I.P
NIP. 197204131998031008

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Pengertian Umum	2
2. GAMBARAN UMUM DAERAH	7
2.1 Letak Geografis.....	8
2.2 Kondisi Administrasi Kabupaten Bantul.....	10
2.3 Potensi Daerah	11
2.4 Prestasi Daerah dalam Bidang Kependudukan.....	13
3. SUMBER DATA	18
4. PROFIL KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN BANTUL.....	19
4.1 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	19
4.1.1 Jumlah Penduduk	19
4.1.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin..	22
4.1.3 Rasio Jenis Kelamin	26
4.1.4 Piramida Penduduk.....	29

4.1.5 Rasio Ketergantungan.....	31
4.1.6 Rasio Kepadatan Penduduk	32
4.1.7 Angka Pertumbuhan Penduduk.....	34
4.2 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	37
4.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	37
4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	39
4.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin.....	43
4.2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan	51
4.3 Keluarga	52
4.3.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.....	53
4.3.2 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK)	55
4.3.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
4.3.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin.....	58
4.3.5 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	61
4.3.6 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja	63
4.4 Kelahiran.....	65
4.4.1 Jumlah Kelahiran.....	66
4.4.2 Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR).....	68
4.5 Kematian	69
4.5.1 Jumlah Kematian	70
4.5.2 Angka Kematian Kasar (<i>Crude Death Rate/CDR</i>)	73
5. KUALITAS PENDUDUK	75
5.1 Kesehatan	75
5.2 Pendidikan.....	77
5.3 Ekonomi	78

5.3.1 Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja).....	79
5.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	83
5.4 Sosial	86
5.5 Mobilitas Penduduk.....	87
6. KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	89
6.1 Kepemilikan Kartu Keluarga.....	89
6.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.....	90
6.3 Kepemilikan Akta	92
6.3.1 Akta Kelahiran.....	92
6.3.2 Akta Perkawinan	98
6.3.3 Akta Perceraian.....	99
7. PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kalurahan, Pedukuhan, dan Luas Kapanewon di Kabupaten Bantul.....	10
Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025	21
Tabel 4.2 Perubahan Jumlah Penduduk menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025	22
Tabel 4.3 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	24
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	25
Tabel 4.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	27
Tabel 4.6 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025	29
Tabel 4.7 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk di Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025	31
Tabel 4.8 Kepadatan Penduduk (<i>Population Density Ratio</i>) Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025	33
Tabel 4.9 Angka Pertumbuhan Penduduk Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025	35
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025	38
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025	41
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Bantul Tahun 2025	44
Tabel 4.13 Angka Perkawinan Kasar di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025	47

Tabel 4.14 Angka Perkawinan Umum di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025	48
Tabel 4.15 Angka Perceraian Kasar di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025	49
Tabel 4.16 Angka Perceraian Umum di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025	50
Tabel 4.17 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bantul Menurut Kecacatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	51
Tabel 4.18 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025	54
Tabel 4.19 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin Tahun 2024 – 2025	56
Tabel 4.20 Jumlah kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon Tahun 2024 – 2025.....	57
Tabel 4.21 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Kapanewon Tahun 2024 – 2025.....	58
Tabel 4.22 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Kapanewon Tahun 2025.....	60
Tabel 4.23 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025.....	63
Tabel 4.24 Jumlah Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Status Bekerja Tahun 2024-2025	65
Tabel 4.25 Jumlah Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2025 Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 4.26 Angka Kelahiran Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	69
Tabel 4.27 Jumlah Pencatatan Kematian Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025	72
Tabel 4.28 Angka Pencatatan Kematian Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025	74

Tabel 5.1 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2025	80
Tabel 5.2 Jumlah Angkatan Kerja (Penduduk yang Bekerja dan Tidak Bekerja) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025	82
Tabel 5.3 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	83
Tabel 5.4 Jumlah Penduduk yang Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk Kabupaten Bantul Tahun 2025	88
Tabel 6.1 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul 2025	90
Tabel 6.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	91
Tabel 6.3 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul 2025.....	93
Tabel 6.4 Kepemilikan Akta Lahir Anak (0-17 tahun) di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	95
Tabel 6.5 Kepemilikan Akta Lahir Anak Usia 0-5 tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	97
Tabel 6.6 Kepemilikan Akta Lahir Anak Usia 0-1 tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	98
Tabel 6.7 Persentase Kepemilikan Buku/Akta Perkawinan yang Dicatatkan di Aplikasi SIAK Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	99
Tabel 6.8 Persentase Kepemilikan Buku/Akta Perceraian yang Dicatatkan di aplikasi SIAK Tahun 2025	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 Semester 2	23
Gambar 4.2 Persentase Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kelompok Umur	26
Gambar 4.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kelompok Umur.....	28
Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025.....	30
Gambar 4.5 Grafik Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025	32
Gambar 4.6 Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025	34
Gambar 4.7 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025.....	36
Gambar 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	39
Gambar 4.9 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pendidikan Tahun 2024 dan 2025	62
Gambar 4.10 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2024 dan 2025.....	64
Gambar 4.11 Jumlah Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2025	66
Gambar 4.12 Jumlah Pencatatan Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2025.....	71
Gambar 6.1 Grafik Perubahan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan 2025	94
Gambar 6.2 Grafik Perubahan Persentase Kepemilikan Akta Lahir Anak (0-17 Tahun) di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan 2025	96

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan digunakan untuk semua keperluan. Keperluan tersebut antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Data tersebut bersumber dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Data dan informasi kependudukan yang akurat sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan yang objektif dalam menetapkan kebijakan, menyusun strategi pembangunan ke depan, serta mengevaluasi program di masa lalu. Pelaksanaan pembangunan yang terus meningkat tentunya membawa dampak pada dinamika kependudukan. Untuk mengetahui keadaan dan persebaran penduduk dengan berbagai kualitas yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis yang jelas dan terarah dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun anggaran.

Dalam era otonomi daerah, kebutuhan informasi kependudukan yang lengkap untuk menunjang perencanaan pembangunan sangatlah penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan. Hal ini telah diatur

secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kependudukan di Kabupaten Bantul. Di sisi lain, penyusunan profil ini juga merupakan wujud optimalisasi pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi di berbagai instansi.

1.2 Tujuan

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025 bertujuan untuk menyajikan data dan informasi mengenai dinamika kependudukan di Kabupaten Bantul. Sajian data ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah, serta perumusan kebijakan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bantul mencakup pembahasan mengenai perkembangan kependudukan yang terdiri atas data kuantitas, kualitas, mobilitas, serta kepemilikan dokumen kependudukan. Adapun batasan wilayah penyajian data mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Bantul yang terdiri atas 17 Kapanewon.

1.4 Pengertian Umum

Terdapat beberapa istilah terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan yang digunakan dalam penyusunan Buku Profil ini. Untuk menyamakan pemahaman, berikut adalah penjabaran istilah-istilah tersebut:

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (UU Nomor 24 Tahun 2013).
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan yang terkait pula dengan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan lingkungan penduduk setempat (UU Nomor 52 Tahun 2009).
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lain (UU Nomor 24 Tahun 2013).
4. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (UU Nomor 24 Tahun 2013).
5. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (UU Nomor 24 Tahun 2013).
6. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (UU Nomor 52 Tahun 2009).
7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU Nomor 52 Tahun 2009).

8. **Profil** adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI).
9. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan, serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (UU Nomor 24 Tahun 2013).
10. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (UU Nomor 24 Tahun 2013).
11. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (UU Nomor 24 Tahun 2013).
12. **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia (UU Nomor 24 Tahun 2013).
13. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (UU Nomor 24 Tahun 2013).
14. **Database Kependudukan** adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data (Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Berikut adalah penjelasan terkait indikator-indikator kependudukan yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan:

- a. **Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin:** Menggambarkan total populasi penduduk yang berdomisili di suatu wilayah pada waktu tertentu, beserta komposisi atau strukturnya.
- b. **Kepadatan Penduduk:** Menunjukkan rasio jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Angka ini bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahun akibat faktor pertumbuhan penduduk alami maupun perpindahan (migrasi).
- c. **Angka Pertumbuhan Penduduk:** Menggambarkan tingkat penambahan atau pengurangan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta migrasi penduduk.
- d. **Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*):** Menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap setiap 100 penduduk perempuan di suatu wilayah.
- e. **Jumlah Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga:** Menunjukkan total jumlah keluarga serta rasio rata-rata banyaknya individu yang mendiami satu keluarga/rumah tangga.
- f. **Jumlah Kelahiran:** Menunjukkan angka peristiwa kelahiran hidup yang terjadi di suatu wilayah pada periode tahun tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin.
- g. **Jumlah Kematian:** Menunjukkan banyaknya peristiwa kematian penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Data ini esensial sebagai basis perhitungan indikator mortalitas dan bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h. **Kepemilikan Kartu Keluarga (KK):** Menunjukkan persentase atau capaian jumlah kepala keluarga yang telah memiliki dokumen Kartu Keluarga.

- i. **Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el):** Menunjukkan persentase atau capaian jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik.
- j. **Kepemilikan Akta Kelahiran:** Menunjukkan persentase atau capaian jumlah penduduk yang peristiwa kelahirannya telah tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran.
- k. **Kepemilikan Akta Perkawinan:** Menunjukkan persentase atau capaian jumlah penduduk dengan status kawin yang telah memiliki dokumen pencatatan perkawinan secara sah.
- l. **Kepemilikan Akta Perceraian:** Menunjukkan persentase atau capaian jumlah penduduk dengan status cerai hidup yang telah memiliki dokumen pencatatan perceraian.
- m. **Kepemilikan Akta Kematian:** Menunjukkan persentase atau capaian penerbitan Kutipan Akta Kematian terhadap jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan.

2. GAMBARAN UMUM DAERAH



Kabupaten Bantul merupakan satu dari lima wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di bagian selatan Pulau Jawa. Secara filosofis dan strategis, arah pembangunan daerah ini dipandu oleh Visi Kabupaten Bantul, yakni:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Cikal bakal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul tidak terlepas dari perjuangan heroik Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan kolonial. Bermarkas di Gua Selarong, perlawanan tersebut berlangsung sengit pada periode 1825 hingga 1830. Pasca-meredam perlawanan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus untuk menangani wilayah *Vorstenlanden* (Tanah Raja-Raja), yang antara lain bertugas mengelola tata pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunungkidul. Tindak lanjut dari komisi ini berupa kontrak antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta terkait pembagian wilayah, pembayaran pampasan perang, penyerahan pemimpin perlawanan, serta pembentukan wilayah administratif baru.

Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831, Pemerintah Hindia Belanda bersama Sultan Yogyakarta mengadakan perjanjian kerja sama untuk menetapkan pembagian wilayah administratif baru di dalam lingkungan Kasultanan beserta penetapan para kepala wilayahnya. Pada masa itu, Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga wilayah kabupaten, yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur.

Menindaklanjuti pembagian wilayah baru tersebut, pada tanggal **20 Juli 1831** (bertepatan dengan penanggalan Jawa: Rabu Kliwon, 10 Sapar Tahun Dal 1759), pembentukan Kabupaten Bantul—yang sebelumnya dikenal dengan nama Bantulkarang—secara resmi ditetapkan. Sri Sultan Hamengku Buwono V kemudian memberikan kepercayaan kepada seorang *Nayaka* Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro untuk mengemban amanah sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli tersebut kemudian ditetapkan dan diperingati setiap tahunnya sebagai **Hari Jadi Kabupaten Bantul**. Pemilihan tanggal ini sarat akan nilai simbolis kepahlawanan dan heroisme bagi masyarakat Bantul, mengingat Perang Diponegoro juga pertama kali dikobarkan pada tanggal 20 Juli 1825. Seiring berjalannya waktu, tata pemerintahan Kabupaten Bantul terus mengalami dinamika. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan mulai didasarkan pada *Osamu Seirei* Nomor 13, sementara aturan *Stadsgemeente Ordonnantie* peninggalan Belanda dihapuskan. Momentum perubahan ini menjadi landasan awal bagi Kabupaten Bantul dalam memiliki hak otonom untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

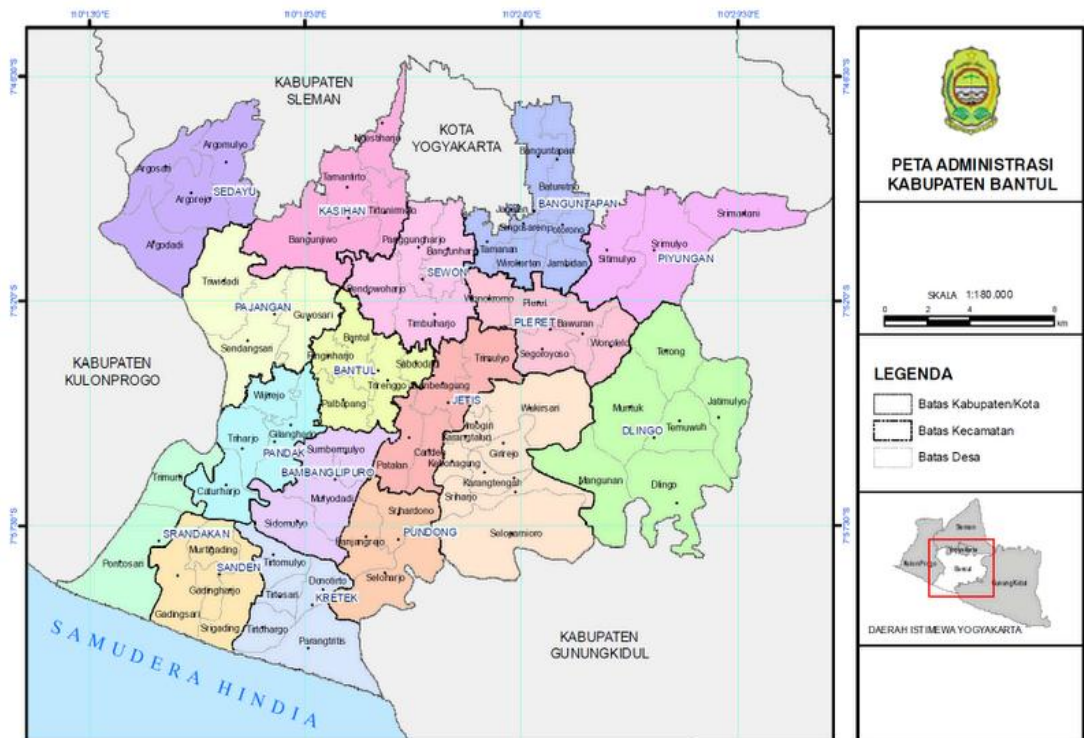
2.1 Letak Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara topografis, bentang alam Kabupaten Bantul didominasi oleh dataran rendah di bagian tengah, gugusan perbukitan di bagian timur dan barat, serta kawasan pesisir pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam ini secara umum membujur dari arah utara ke selatan.

Secara astronomis, Kabupaten Bantul terletak di antara koordinat 07° 44' 04" – 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" – 110° 31' 08" Bujur Timur. Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Bantul meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah timur

berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Visualisasi batas wilayah tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada Peta Administrasi Kabupaten Bantul berikut:



Selain bentang alam daratan, ekologi wilayah Kabupaten Bantul juga didukung oleh keberadaan beberapa sungai besar yang airnya mengalir sepanjang tahun, di antaranya yaitu:

1. Sungai Oyo
2. Sungai Opak
3. Sungai Code
4. Sungai Winongo
5. Sungai Bedog
6. Sungai Progo

2.2 Kondisi Administrasi Kabupaten Bantul

Secara administratif, Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 933 pedukuhan (lihat Tabel 2.1). Kapanewon Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 59,54 km². Sementara itu, jumlah kalurahan terbanyak terdapat di Kapanewon Imogiri dan Banguntapan dengan masing-masing delapan kalurahan, sedangkan jumlah pedukuhan terbanyak terdapat di Kapanewon Jetis dengan 72 pedukuhan.

Tabel 2.1 Jumlah Kalurahan, Pedukuhan, dan Luas Kapanewon di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Dusun	Luas (km ²)
1.	Srandakan	2	43	18,51
2.	Sanden	4	62	23,11
3.	Kretek	5	52	26,47
4.	Pundong	3	49	23,11
5.	Bambanglipuro	3	45	23,10
6.	Pandak	4	49	24,26
7.	Pajangan	3	50	33,29
8.	Bantul	5	64	21,81
9.	Jetis	4	72	23,53
10.	Imogiri	8	58	54,92
11.	Dlingo	6	47	59,54
12.	Banguntapan	8	60	28,42
13.	Pleret	5	57	24,20
14.	Piyungan	3	63	33,26
15.	Sewon	4	53	27,90
16.	Kasihan	4	55	32,09
17.	Sedayu	4	54	34,19
Jumlah		75	933	511,71

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2023

Berdasarkan tinjauan aksesibilitas terhadap pusat pemerintahan, Kapanewon Dlingo merupakan wilayah dengan jarak tempuh terjauh, baik menuju pusat ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi. Sementara itu, wilayah yang memiliki jarak terdekat dengan pusat ibu kota kabupaten adalah Kapanewon Bantul. Adapun akses terdekat menuju pusat pemerintahan ibu kota

provinsi (Kota Yogyakarta) dimiliki oleh Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan.

2.3 Potensi Daerah

Kabupaten Bantul memiliki beragam potensi daerah yang menjadi pilar utama penggerak perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi potensi ini sangat didukung oleh struktur demografi penduduk yang produktif serta kearifan lokal yang masih terjaga. Secara garis besar, potensi unggulan daerah Kabupaten Bantul bertumpu pada beberapa sektor strategis berikut:

1. Sektor Industri Kreatif dan UMKM



Kabupaten Bantul dikenal luas sebagai jantung industri kreatif dan kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan telah diakui dalam jejaring kota kreatif dunia. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Bantul yang memiliki etos kerja tinggi dan jiwa seni terwujud dalam berbagai sentra kerajinan berskala internasional. Beberapa di antaranya meliputi sentra gerabah di Kasongan, kerajinan kulit di Manding, batik tulis di Giriloyo, dan kerajinan kayu/batik kayu di Kreet. Sektor UMKM ini berperan sangat vital dalam menyerap tenaga kerja lokal, menekan angka pengangguran, dan mendistribusikan kemandirian ekonomi hingga ke tingkat pedukuhan.

2. Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor andalan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yang pertumbuhannya sangat pesat. Bantul memiliki bentang alam yang memfasilitasi beragam jenis wisata, mulai dari pesona pesisir pantai di wilayah selatan (seperti Pantai Parangtritis, Pantai



Depok, dan Pantai Gua Cemara), pesona perbukitan di wilayah timur (seperti kawasan Hutan Pinus Mangunan dan Puncak Becici), hingga wisata warisan sejarah dan budaya (seperti Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri).

Perkembangan pariwisata di Bantul saat ini sangat didukung oleh model Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community-Based Tourism*) melalui pengembangan Desa Wisata, yang secara langsung memberdayakan penduduk setempat secara ekonomi dan sosial.

3. Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan



Meskipun arus modernisasi dan alih fungsi lahan terus berjalan, sektor pertanian dan agrobisnis tetap menjadi tulang punggung bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul, khususnya di kawasan dataran rendah (lembah subur) dan kawasan pesisir.

Kabupaten Bantul memiliki komoditas unggulan pertanian seperti padi, palawija, serta budidaya bawang merah lahan pasir di wilayah selatan (Kapanewon Sanden dan Kretek). Selain itu, panjangnya garis pantai di wilayah selatan juga menyimpan potensi perikanan laut dan budidaya perikanan darat yang esensial dalam menjaga ketahanan pangan penduduk.

4. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan



Potensi terbesar Kabupaten Bantul sejatinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Keberadaan berbagai perguruan tinggi terkemuka, baik negeri maupun swasta (seperti Institut Seni Indonesia/ISI Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, dll) di wilayah Bantul telah menciptakan ekosistem pendidikan yang

kuat. Tingginya angka partisipasi sekolah penduduk Bantul menjadi modal sosial yang sangat krusial dalam menyongsong fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif dapat dikonversi menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang inovatif dan berdaya saing.

2.4 Prestasi Daerah dalam Bidang Kependudukan

Kabupaten Bantul tercatat memiliki rekam jejak prestasi yang gemilang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai inovasi berkelanjutan yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul dalam mendekatkan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Berbagai lompatan inovasi tersebut merupakan manifestasi nyata dalam mewujudkan visi Disdukcapil Kabupaten Bantul, yakni *“Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”*. Komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan inovatif telah mengantarkan Disdukcapil Kabupaten Bantul meraih berbagai penghargaan bergengsi di tingkat nasional.

Rangkaian prestasi tersebut diawali dengan perolehan dan konsistensi Disdukcapil Bantul dalam mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu **ISO 9001:2015** sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Selain itu, Disdukcapil juga telah mengantongi sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi **ISO 27001:2013**, yang menjamin keamanan data kependudukan masyarakat. Pada bulan November 2015, komitmen daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran mendapatkan pengakuan melalui penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI, di mana Kabupaten Bantul dinilai berhasil melampaui target nasional cakupan kepemilikan Akta Kelahiran lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan. Kinerja pelayanan prima Disdukcapil semakin diakui di tingkat nasional pada tahun 2020, dengan meraih dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(KemenPANRB), yaitu penghargaan sebagai unit kerja berpredikat **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** serta penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori **“Pelayanan Prima”**. Prestasi ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana Disdukcapil kembali meraih Peringkat II sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori **“Pelayanan Prima”** Lingkup Disdukcapil Kabupaten/Kota Tingkat Nasional.

Di tahun 2024, kinerja pelayanan publik Disdukcapil mendapatkan pengakuan tinggi dengan meraih Peringkat II Nasional dalam Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI, dengan capaian Kategori Kualitas Tertinggi (**Zona Hijau**). Rekam jejak prestasi yang membanggakan ini kemudian ditutup dengan capaian terbaru pada tahun 2025. Tepat pada tanggal 27 November 2025, Disdukcapil Bantul kembali membuktikan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik dengan memperoleh dua penghargaan sekaligus dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik DIY Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Penghargaan tersebut meliputi predikat sebagai **Badan Publik INFORMATIF** dengan nilai **91,95**, serta piagam penghargaan khusus dalam Kategori **Apresiasi PPID/PLID Berprestasi** dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik DIY.

Berbagai pencapaian dan penghargaan tersebut tentu tidak akan mampu diraih tanpa adanya komitmen kuat dari jajaran pimpinan hingga seluruh staf Disdukcapil, serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sebagai bentuk pengejawantahan dari komitmen tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bantul secara konsisten melahirkan berbagai program pelayanan administrasi kependudukan yang inovatif.

Berikut adalah deretan program inovasi unggulan Disdukcapil Kabupaten Bantul guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan inklusif:

1. **SITUPAT (2017)**: Inovasi terintegrasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan tiga dokumen kependudukan

sekaligus secara lebih cepat, yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

2. **KAPERU (2017):** Program fasilitasi penertiban administrasi kependudukan yang memberikan KTP-el dan KK baru—dengan pembaruan status perkawinan—secara bersamaan dengan penyerahan buku nikah.
3. **AKSI SIMPATI (2018):** Program Akta Kematian Sehari Jadi. Merupakan percepatan pelayanan yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa, di mana dokumen Akta Kematian, KK, dan KTP-el ahli waris langsung diserahkan pada saat upacara pemakaman sebelum jenazah dimakamkan.
4. **AKSI MESRA (2018):** Akselerasi Mempelai Sadar Administrasi Kependudukan Sistematis, Terintegrasi. Inovasi pelayanan yang mengintegrasikan layanan pencatatan perkawinan dengan pemuka agama. Melalui program ini, calon pengantin tidak perlu datang ke dinas, namun dapat langsung memperoleh Akta Perkawinan, KTP-el, KK mutakhir, dan Identitas Kependudukan Digital secara gratis melalui petugas yang ditunjuk.
5. **MOROLEGA (2019):** Mobil Operasional Layanan Administrasi Kependudukan Efektif Sekaligus Akurat. Pelayanan jemput bola (turun langsung ke masyarakat) menggunakan armada mobil khusus yang telah dilengkapi dengan peralatan perekaman KTP-el dan pencetakan dokumen.
6. **Dukcapil Smart Bantul (2019):** Inovasi layanan berbasis aplikasi *online* yang dapat diunduh melalui Google Play, bertujuan untuk memudahkan masyarakat Bantul dalam mengakses layanan seperti cetak KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, secara mandiri.
7. **LEONTIN MAS (2020):** Legalisir Online Mudah Akurat Simpel. Terobosan layanan yang memungkinkan masyarakat melakukan legalisir dokumen kependudukan secara *online* tanpa harus antre, cukup dengan mengirimkan berkas pindaian (PDF) melalui email.

8. **M-KIA (2021):** Layanan inovatif pengiriman dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia bagi masyarakat yang memohonkan layanannya secara *online*.
9. **PAGODA PASTI JOSS (2021):** Perekaman KTP-el Plus Tes Golongan Darah. Layanan pembaruan data yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan/PMI, memberikan fasilitas tes golongan darah gratis bagi penduduk agar elemen data golongan darah pada database KK menjadi lengkap.
10. **SIPENDAPA (2021):** Sistem Penerbitan Dokumen Kependudukan di Pengadilan Agama. Inovasi integrasi penerbitan dokumen yang memudahkan penduduk Bantul dengan perubahan status cerai hidup untuk langsung mendapatkan KK dan KTP-el terbaru.
11. **SIKEBAP (2021):** Sistem Pelayanan KTP Bagi Aparatur Purna. Kemudahan layanan terintegrasi dengan BKPSDM bagi para ASN yang purna tugas untuk memutakhirkan status pekerjaan di KTP-el dan KK-nya menjadi pensiunan.
12. **Podcast Rolasan Oke (2021):** Ngobrol Asik Adminduk yang Obyektif, Komprehensif dan Efektif. Inovasi saluran publikasi dan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan yang dikemas secara menarik melalui media YouTube.
13. **SIKAPITEN TNI & POLRI (2022):** Layanan prioritas yang memberikan kemudahan verifikasi dan penerbitan KTP-el serta KK bagi anggota Kodim 0729 Bantul dan Polres Bantul, baik bagi anggota baru maupun yang memasuki masa purna tugas.
14. **LARISA (2023):** Layanan Hari Sabtu, yang sebelumnya sudah dimulai sejak September 2014. Optimalisasi pelayanan ekstra pada hari libur yang ditujukan bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen kependudukan pada hari kerja biasa.
15. **JALAN TERANG (2024):** Jejaring Layanan Aktif Bagi yang Terhambat Pengurusan Adminduk Nyaman dan Gratis. Pelayanan khusus hasil

kolaborasi dengan Dinas Sosial yang menysasar penduduk rentan (seperti ODGJ, disabilitas, anak terlantar, hingga korban kekerasan) untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum dan hak sipil melalui keabsahan identitas.

16. **PATIMURA (2024):** Pemenuhan Hak Identitas Kependudukan Terintegrasi dengan Rutan Anak / LPKA Kelas II Yogyakarta. Inovasi untuk memastikan pemenuhan dokumen KTP-el, KIA, dan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, agar akses layanan publik mereka tidak terputus.
17. **Jebol Perekat Duren (2025):** Jemput Bola Perekaman KTP bagi Penduduk Rentan. Sebuah sistem layanan inklusif yang terintegrasi antara Dukcapil, Dinsos, Puskesmas, dan Kalurahan untuk memetakan serta melakukan perekaman identitas bagi kelompok rentan (ODGJ, disabilitas, lansia) secara proaktif dan terjadwal.
18. **SIJAKKA (2025):** Sosialisasi Penjangkauan Administrasi Kependudukan di Kalurahan. Merupakan program strategis untuk meningkatkan capaian kepemilikan dokumen sekaligus memvalidasi data kependudukan secara berkelanjutan di tingkat akar rumput, guna mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

3. SUMBER DATA

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Bantul bersumber dari dua klasifikasi utama, yaitu data registrasi kependudukan dan data lintas sektor. Kedua sumber data ini dipadukan untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, akurat, dan mutakhir, yang pada akhirnya akan berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor.

Sumber data yang pertama dan paling utama adalah data registrasi berupa Data Agregat Kependudukan. Secara spesifik, penyusunan buku profil ini merujuk pada pemutakhiran Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Semester 2 Tahun 2025. Data agregat tersebut merupakan himpunan data kuantitatif dan kualitatif terstruktur yang memang dikhususkan untuk kebutuhan statistik dan perencanaan daerah. Seluruh data pokok ini direkam dan diintegrasikan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Sesuai dengan prinsip data tunggal, basis data ini menjadi satu-satunya acuan resmi untuk semua keperluan pemerintahan.

Sumber data yang kedua adalah data lintas sektor. Data ini berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk melengkapi variabel informasi kependudukan yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh sistem SIAK. Salah satu bentuk implementasinya adalah pemanfaatan data lintas instansi yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Data lintas sektor ini digunakan secara khusus untuk mengonsolidasikan dan melengkapi rincian data sekunder mengenai peristiwa pencatatan perkawinan penduduk di wilayah Kabupaten Bantul.

4. PROFIL KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN BANTUL

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Jumlah populasi yang besar dapat menjadi keuntungan strategis tersendiri bagi suatu wilayah karena menyediakan kelimpahan sumber daya manusia dan tenaga kerja potensial yang dapat didayagunakan untuk menggerakkan roda pembangunan. Ditinjau dari dimensi kuantitas, kondisi demografi ini dapat diuraikan secara mendalam berdasarkan jumlah absolut dan relatif, pola sebaran atau distribusi, serta Karakteristik demografisnya. Secara komprehensif, ulasan mengenai profil kuantitas penduduk Kabupaten Bantul pada bab ini akan memotret lima hal pokok, yaitu: 1) Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi; 2) Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial; 3) Kondisi Keluarga; 4) Kelahiran; dan 5) Kematian.

4.1 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan perilaku sosial ekonomi masyarakat. Dua Karakteristik demografi yang paling utama adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk berdasarkan umur ini umumnya dikelompokkan ke dalam rentang umur satu tahunan (umur tunggal/*single age*) maupun kelompok umur lima tahunan. Meskipun demikian, pengelompokan tersebut juga dapat disesuaikan kembali ke dalam rentang umur tertentu berdasarkan kebutuhan spesifik pendataan.

4.1.1 Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk diperoleh dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025 yang bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Total jumlah penduduk di

Kabupaten Bantul pada tahun 2025 tercatat sebanyak 985.142 jiwa. Hal ini menunjukkan telah terjadi pertumbuhan atau penambahan penduduk sebesar 4.873 jiwa jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya (2024). Berdasarkan sebaran wilayah administratifnya, Kapanewon Banguntapan menduduki posisi sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni melampaui angka 118 ribu jiwa. Sebaliknya, konsentrasi penduduk yang lebih rendah dengan jumlah di bawah 40 ribu jiwa terdapat di lima kapanewon, yaitu Kapanewon Kretek, Srandakan, Sanden, Pundong, dan Pajangan.

Secara lebih rinci, penduduk di Kapanewon Banguntapan pada tahun 2025 berjumlah 118.712 jiwa, yang menyumbang sebesar 12,05 persen dari total penduduk Kabupaten Bantul. Selain Banguntapan, wilayah lain yang tergolong memiliki konsentrasi jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Bantul adalah Kapanewon Kasihan dengan jumlah penduduk sebesar 109.474 jiwa (11,11 persen dari total penduduk), serta Kapanewon Sewon dengan jumlah penduduk mencapai 103.738 jiwa (10,53 persen).

Di sisi lain, Kapanewon Kretek tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 30.941 jiwa atau hanya sekitar 3,14 persen dari total penduduk Kabupaten Bantul. Kapanewon dengan jumlah penduduk terkecil berikutnya secara berturut-turut ditempati oleh Kapanewon Srandakan dengan 31.171 jiwa (3,16 persen) dan Kapanewon Sanden dengan 31.945 jiwa (3,24 persen). Rincian komprehensif mengenai persebaran jumlah dan persentase penduduk pada masing-masing kapanewon disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Jumlah Penduduk	Persentase
Srandakan	31.171	3,16
Sanden	31.945	3,24
Kretek	30.941	3,14
Pundong	36.344	3,69
Bambanglipuro	42.284	4,29
Pandak	52.927	5,37
Pajangan	38.473	3,91
Bantul	67.116	6,81
Jetis	60.240	6,11
Imogiri	65.229	6,62
Dlingo	40.602	4,12
Banguntapan	118.712	12,05
Pleret	50.536	5,13
Piyungan	54.957	5,58
Sewon	103.738	10,53
Kasihan	109.474	11,11
Sedayu	50.453	5,12
Jumlah	985.142	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Berdasarkan data SIAK periode 2024–2025, hampir seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul mencatatkan pertumbuhan penduduk positif. Pertambahan tertinggi terjadi di Kapanewon Banguntapan sebesar 837 jiwa, diikuti oleh Kapanewon Kasihan (695 jiwa) dan Kapanewon Sewon (500 jiwa). Ketiga wilayah tersebut menjadi penyumbang utama penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

Sebaliknya, pertumbuhan positif terendah tercatat di Kapanewon Pundong (13 jiwa), Sanden (62 jiwa), Kretek (75 jiwa), dan Dlingo (78 jiwa). Sementara itu, Kapanewon Srandakan menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami pengurangan jumlah penduduk, yakni berkurang sebanyak 8 jiwa pada rentang tahun tersebut. Rincian data perubahan ini selengkapnya disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Perubahan Jumlah Penduduk menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025

Kapanewon	2024		2025		Perubahan Jumlah Penduduk dari 2024 - 2025 (jiwa)
	Jumlah Penduduk	Presen tase	Jumlah Penduduk	Presen tase	
Srandakan	31.179	3,20	31.171	3,16	-8
Sanden	31.883	3,28	31.945	3,24	62
Kretek	30.866	3,17	30.941	3,14	75
Pundong	36.331	3,72	36.344	3,69	13
Bambanglipuro	42.153	4,32	42.284	4,29	131
Pandak	52.732	5,39	52.927	5,37	195
Pajangan	38.113	3,88	38.473	3,91	360
Bantul	66.705	6,79	67.116	6,81	411
Jetis	59.962	6,13	60.240	6,11	278
Imogiri	65.013	6,66	65.229	6,62	216
Dlingo	40.524	4,16	40.602	4,12	78
Banguntapan	117.875	11,95	118.712	12,05	837
Pleret	50.191	5,11	50.536	5,13	345
Piyungan	54.691	5,57	54.957	5,58	266
Sewon	103.238	10,52	103.738	10,53	500
Kasihan	108.779	11,06	109.474	11,11	695
Sedayu	50.034	5,09	50.453	5,12	419
Jumlah	980.269	100	985.142	100	4.873

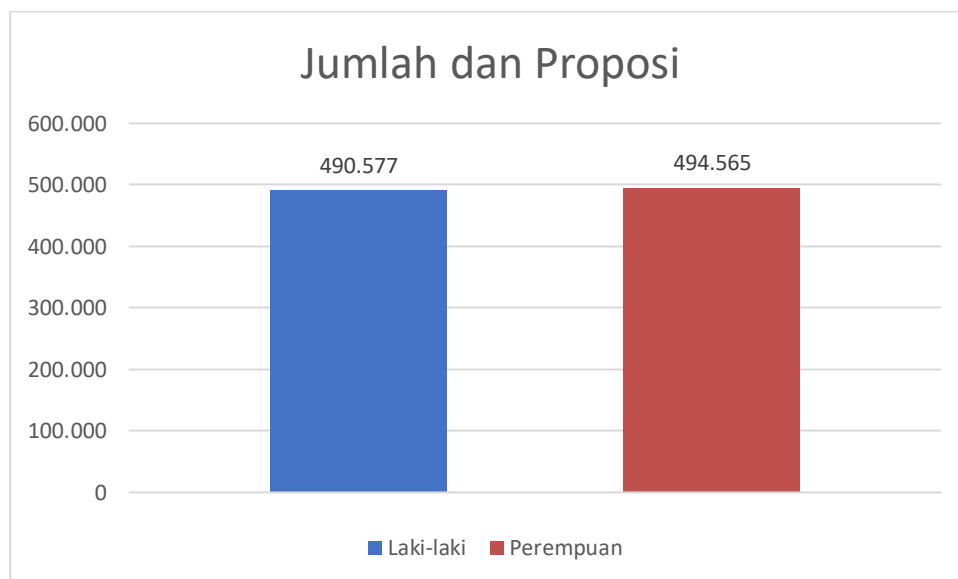
Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan 2025 Semester 2

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Banguntapan, Kasihan, dan Sewon utamanya didorong oleh faktor kelahiran dan tingginya angka migrasi masuk. Sebagai kawasan aglomerasi perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, ketiga wilayah ini berkembang pesat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh masifnya pembangunan perumahan, fasilitas pendidikan, industri, serta sektor perdagangan dan jasa.

4.1.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul seluruhnya tercatat sebanyak 985.142 jiwa. Dari total tersebut, komposisi penduduk sedikit didominasi oleh

perempuan dengan proporsi mencapai 50,20 persen atau sebanyak 494.565 jiwa. Sementara itu, penduduk laki-laki mencakup 49,80 persen sisanya, yakni sebanyak 490.577 jiwa. Visualisasi perbandingan persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bantul ini dapat dilihat secara jelas pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Persentase Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 Semester 2

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Dominasi penduduk perempuan ini terjadi secara merata dan konsisten dengan tren struktur demografi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan rincian pada Tabel 4.3, tercatat ada empat belas (14) kapanewon yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, saat ini hanya tersisa tiga (3) kapanewon yang mencatatkan dominasi penduduk laki-laki dengan proporsi di atas 50 persen. Ketiga wilayah tersebut meliputi Kapanewon Pleret dengan persentase laki-laki sebesar 50,34 persen, disusul oleh Kapanewon Pandak sebesar 50,26 persen, dan Kapanewon Pajangan sebesar 50,11 persen. Rincian persebaran jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin pada setiap kapanewon disajikan secara lengkap pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Laki-laki		Perempuan		L + P	
	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase
Srandakan	15.506	3,16	15.665	3,17	31.171	3,16
Sanden	15.773	3,22	16.172	3,27	31.945	3,24
Kretek	15.234	3,11	15.707	3,18	30.941	3,14
Pundong	18.027	3,67	18.317	3,70	36.344	3,69
Bambanglipuro	20.931	4,27	21.353	4,32	42.284	4,29
Pandak	26.600	5,42	26.327	5,32	52.927	5,37
Pajangan	19.278	3,93	19.195	3,88	38.473	3,91
Bantul	33.300	6,79	33.816	6,84	67.116	6,81
Jetis	30.089	6,13	30.151	6,10	60.240	6,11
Imogiri	32.378	6,60	32.851	6,64	65.229	6,62
Dlingo	20.189	4,12	20.413	4,13	40.602	4,12
Banguntapan	58.918	12,01	59.794	12,09	118.712	12,05
Pleret	25.442	5,19	25.094	5,07	50.536	5,13
Piyungan	27.354	5,58	27.603	5,58	54.957	5,58
Sewon	51.852	10,57	51.886	10,49	103.738	10,53
Kasihan	54.604	11,13	54.870	11,09	109.474	11,11
Sedayu	25.102	5,12	25.351	5,13	50.453	5,12
Jumlah	490.577	100,00	494.565	100,00	985.142	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

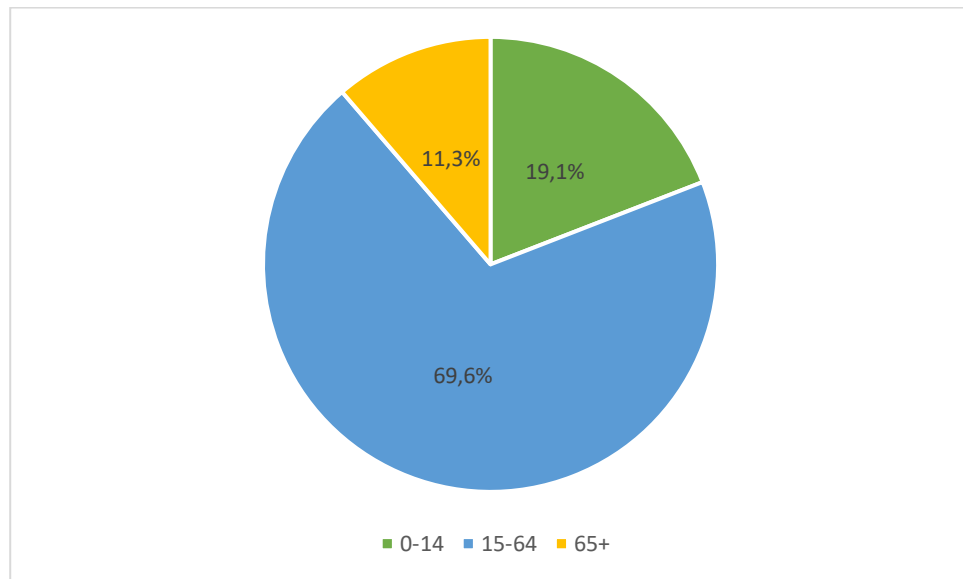
Tabel 4.4 menyajikan gambaran lengkap jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Bantul berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar di hampir semua kelompok umur. Secara umum, pada kelompok umur muda, jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak daripada perempuan. Sebaliknya, untuk kelompok umur di atas 50 tahun, jumlah penduduk perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa usia harapan hidup perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Persentase
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P	
0-4	26.392	24.451	50.843	5,16
5-9	34.088	32.068	66.156	6,72
10-14	36.600	34.633	71.233	7,23
15-19	37.834	35.919	73.753	7,49
20-24	35.115	33.200	68.315	6,93
25-29	34.091	34.358	68.449	6,95
30-34	34.738	35.009	69.747	7,08
35-39	33.017	33.701	66.718	6,77
40-44	38.396	38.268	76.664	7,78
45-49	36.938	36.181	73.119	7,42
50-54	33.487	33.938	67.425	6,84
55-59	31.960	33.291	65.251	6,62
60-64	26.791	29.263	56.054	5,69
65-69	22.215	24.515	46.730	4,74
70-74	14.273	14.430	28.703	2,91
> 75	14.642	21.340	35.982	3,65
Total	490.577	494.565	985.142	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Jika ditinjau berdasarkan pengelompokan umurnya, penduduk di Kabupaten Bantul sangat dominan berada pada usia produktif. Gambar 4.2 menjelaskan secara rinci bahwa sebanyak 69,60 persen penduduk tergolong dalam usia produktif, yakni pada rentang usia antara 15 sampai 64 tahun. Rentang umur ini merupakan usia prima bagi seseorang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam kondisi fisik terbaiknya. Selain menggambarkan usia produktif, Gambar 4.2 juga memvisualisasikan proporsi penduduk kategori usia nonproduktif. Sebesar 19,10 persen penduduk tergolong usia muda (0–14 tahun) dan 11,30 persen tergolong usia tua (65 tahun ke atas). Artinya, sebanyak 30,40 persen dari total penduduk Kabupaten Bantul masuk dalam kategori usia nonproduktif.



Gambar 4.2 Persentase Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kelompok Umur

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

4.1.3 Rasio Jenis Kelamin

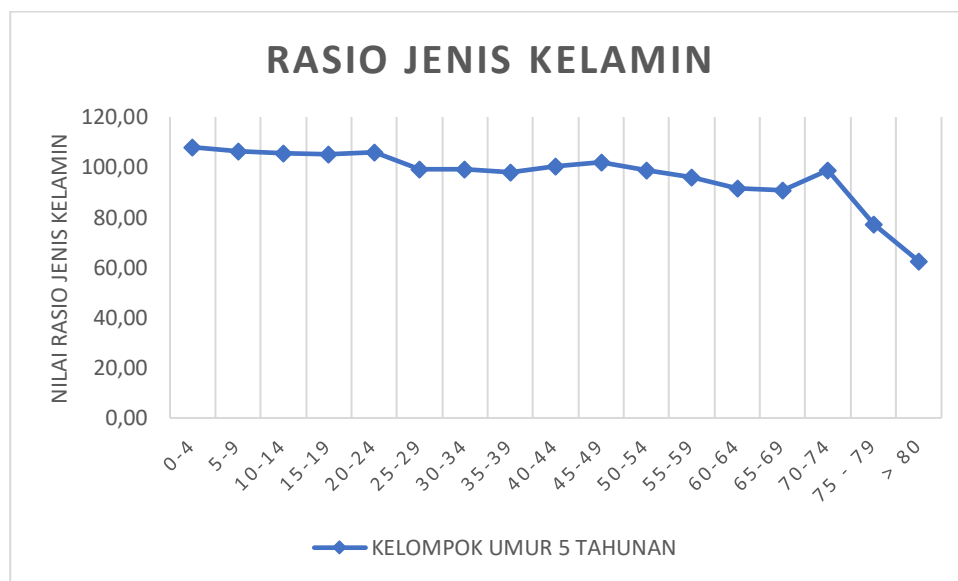
Rasio jenis kelamin didefinisikan sebagai perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Penghitungannya dilakukan dengan membagi jumlah laki-laki dengan perempuan, lalu dikalikan konstanta 100, untuk menggambarkan banyaknya laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan Tabel 4.5, total penduduk Kabupaten Bantul menurut data DKB tahun 2025 adalah 985.142 jiwa, dengan rincian 490.577 laki-laki dan 494.565 perempuan. Angka *sex ratio* tercatat sebesar 99,19, yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Bantul, terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki.

Tabel 4.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P	
0-4	26.392	24.451	50.843	107,94
5-9	34.088	32.068	66.156	106,30
10-14	36.600	34.633	71.233	105,68
15-19	37.834	35.919	73.753	105,33
20-24	35.115	33.200	68.315	105,77
25-29	34.091	34.358	68.449	99,22
30-34	34.738	35.009	69.747	99,23
35-39	33.017	33.701	66.718	97,97
40-44	38.396	38.268	76.664	100,33
45-49	36.938	36.181	73.119	102,09
50-54	33.487	33.938	67.425	98,67
55-59	31.960	33.291	65.251	96,00
60-64	26.791	29.263	56.054	91,55
65-69	22.215	24.515	46.730	90,62
70-74	14.273	14.430	28.703	98,91
75 - 79	6.991	9.061	16.052	77,15
80 ke atas	7.529	12.043	19.572	62,52
Total	490.577	494.565	985.142	99,19

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Rasio jenis kelamin juga dapat disajikan berdasarkan kelompok umur. Merujuk Tabel 4.5, rasio jenis kelamin di Kabupaten Bantul pada kelompok umur 0–4 tahun hingga 20–24 tahun mencatatkan nilai lebih dari 100. Selanjutnya, angka lebih dari seratus juga kembali terlihat pada kelompok umur 40–44 tahun dan 45–49 tahun. Kondisi pada kelompok umur muda ini umumnya dikarenakan rasio kelahiran bayi laki-laki yang secara alamiah sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Untuk lebih memperjelas tren tersebut, Gambar 4.3 memvisualisasikan grafik rasio jenis kelamin menurut kelompok umur di Kabupaten Bantul pada tahun 2025.



Gambar 4.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kelompok Umur

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Jika tinjauan rasio jenis kelamin didasarkan pada sebaran wilayah, dapat diketahui bahwa Kapanewon Pleret dengan rasio jenis kelamin tertinggi pada tahun 2025 adalah Kapanewon Pleret, yakni sebesar 101,39. Meskipun angka tersebut sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Kapanewon Pleret tetap menempati posisi teratas sebagai wilayah dengan angka rasio jenis kelamin paling tinggi di Kabupaten Bantul. Sebaliknya, wilayah yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kapanewon Kretek, yaitu sebesar 96,99. Hal ini mengandung arti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kapanewon Kretek, hanya terdapat sekitar 97 penduduk laki-laki. Rincian lebih komprehensif mengenai data rasio jenis kelamin di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 menurut kapanewon dapat dicermati pada Tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul
Semester 2 Tahun 2025**

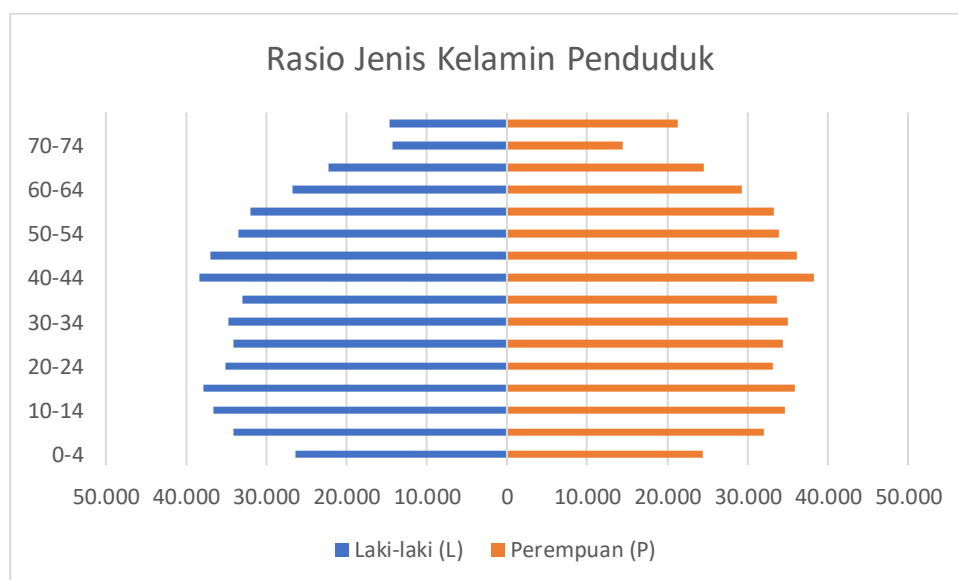
Kapanewon	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P	
Srandakan	15.506	15.665	31.171	98,98
Sanden	15.773	16.172	31.945	97,53
Kretek	15.234	15.707	30.941	96,99
Pundong	18.027	18.317	36.344	98,42
Bambanglipuro	20.931	21.353	42.284	98,02
Pandak	26.600	26.327	52.927	101,04
Pajangan	19.278	19.195	38.473	100,43
Bantul	33.300	33.816	67.116	98,47
Jetis	30.089	30.151	60.240	99,79
Imogiri	32.378	32.851	65.229	98,56
Dlingo	20.189	20.413	40.602	98,90
Banguntapan	58.918	59.794	118.712	98,53
Pleret	25.442	25.094	50.536	101,39
Piyungan	27.354	27.603	54.957	99,10
Sewon	51.852	51.886	103.738	99,93
Kasihan	54.604	54.870	109.474	99,52
Sedayu	25.102	25.351	50.453	99,02
Jumlah	490.577	494.565	985.142	99,19

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

4.1.4 Piramida Penduduk

Piramida penduduk merupakan instrumen grafis yang menyajikan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Melalui visualisasi ini, kondisi demografi suatu wilayah dapat dipetakan secara komprehensif. Analisis piramida penduduk sangat krusial dalam membaca struktur umur masyarakat, yang implikasinya berkaitan erat dengan perencanaan penyediaan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh kelompok usia, mulai dari balita hingga lansia. Di samping itu, struktur ini juga menjadi landasan strategis dalam memproyeksikan potensi ketersediaan tenaga kerja serta persiapan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja di masa depan.

Secara keseluruhan, visualisasi pada Gambar 4.4 merepresentasikan profil kependudukan Kabupaten Bantul yang memiliki struktur transisi dari penduduk muda menuju penduduk dewasa. Piramida ini memperlihatkan adanya konsentrasi yang kuat pada kelompok usia produktif. Jumlah penduduk paling besar terpusat pada rentang umur 40–44 tahun dengan total 76.664 jiwa, disusul oleh kelompok umur 45–49 tahun sebanyak 73.119 jiwa. Sementara itu, proporsi jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada kelompok usia senja, di mana kelompok umur 70–74 tahun tercatat sebanyak 28.703 jiwa, dan kelompok umur 75 tahun ke atas sebanyak 35.982 jiwa.



Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 Semester 2

Bentuk dasar piramida tersebut juga mengindikasikan bahwa laju kelahiran di Kabupaten Bantul relatif rendah dan terkendali. Hal ini terlihat secara visual dari bentuk sayap bawah piramida pada kelompok umur 0–4 tahun yang lebih pendek jika dibandingkan dengan sayap piramida pada kelompok umur 5–9 tahun di atasnya. Fenomena menarik lainnya yang patut dicermati dari struktur ini adalah tren proporsi penduduk perempuan yang semakin melebar seiring dengan bertambahnya umur. Semakin tinggi kelompok umurnya, jumlah penduduk perempuan terlihat semakin mendominasi dibandingkan laki-laki.

Kondisi demografis ini berkorelasi kuat dengan lebih tingginya usia harapan hidup bagi perempuan di wilayah Kabupaten Bantul.

4.1.5 Rasio Ketergantungan

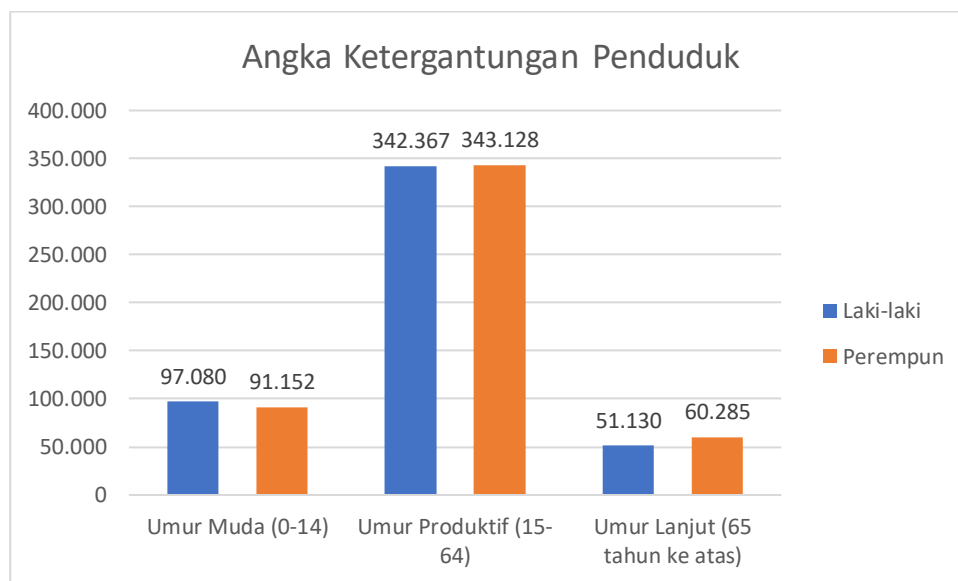
Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Kelompok nonproduktif mencakup penduduk berusia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas, sedangkan kelompok produktif berada pada rentang usia 15 hingga 64 tahun. Rasio ini secara langsung mencerminkan besaran beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok produktif. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar beban untuk membiayai kehidupan penduduk nonproduktif. Oleh karena itu, indikator ini kerap digunakan untuk menakar gambaran kasar kondisi perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan Tabel 4.7 dan Gambar 4.5, penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul sangat mendominasi populasi, yakni sebesar 69,58 persen. Sementara itu, proporsi paling rendah ditempati oleh kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) sebesar 11,31 persen, disusul penduduk usia muda sebesar 19,11 persen. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia muda (0–14 tahun) didominasi oleh penduduk laki-laki. Sebaliknya, pada kelompok usia produktif (15–64 tahun) maupun usia lanjut (65 tahun ke atas), jumlah penduduk perempuan tercatat lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 4.7 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk di Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025

Struktur Umur	Jenis Kelamin			Persentase
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P	
Umur Muda (0-14)	97.080	91.152	188.232	19,11
Umur Produktif (15-64)	342.367	343.128	685.495	69,58
Umur Lanjut (65 tahun ke atas)	51.130	60.285	111.415	11,31
Jumlah	490.577	494.565	985.142	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2



Gambar 4.5 Grafik Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

4.1.6 Rasio Kepadatan Penduduk

Rasio kepadatan penduduk merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah, atau menunjukkan rata-rata jumlah penduduk yang mendiami setiap satu kilometer persegi wilayah pada periode tertentu. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul terus mengalami tren kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel 4.8, kepadatan penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2025 mencapai 1.925,20 jiwa per km². Mengingat kepadatan penduduk pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.915,20 jiwa per km², maka terjadi kenaikan kepadatan penduduk sebesar 0,52 persen di tingkat kabupaten.

**Tabel 4.8 Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)
Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2025**

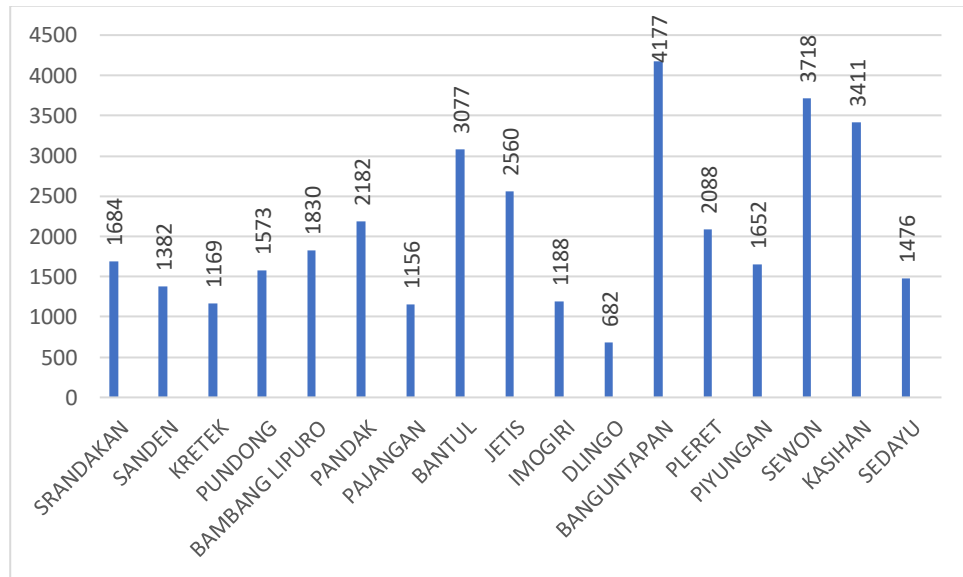
Kapanewon	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Rasio Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
Srandakan	31.171	18,51	1.684,01
Sanden	31.945	23,11	1.382,30
Kretek	30.941	26,47	1.168,91
Pundong	36.344	23,11	1.572,65
Bambanglipuro	42.284	23,10	1.830,48
Pandak	52.927	24,26	2.181,66
Pajangan	38.473	33,29	1.155,69
Bantul	67.116	21,81	3.077,30
Jetis	60.240	23,53	2.560,14
Imogiri	65.229	54,92	1.187,71
Dlingo	40.602	59,54	681,93
Banguntapan	118.712	28,42	4.177,06
Pleret	50.536	24,20	2.088,26
Piyungan	54.957	33,26	1.652,35
Sewon	103.738	27,90	3.718,21
Kasihan	109.474	32,09	3.411,47
Sedayu	50.453	34,19	1.475,67
Jumlah	985.142	511,71	1.925,20

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Berdasarkan sebaran wilayahnya, Kapanewon Banguntapan tercatat sebagai wilayah terpadat, di mana setiap satu kilometer persegi dihuni oleh 4.177 jiwa. Tingginya kepadatan ini sangat dimungkinkan karena Banguntapan merupakan zona perbatasan strategis yang menghubungkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi berikutnya secara berturut-turut ditempati oleh Kapanewon Sewon dengan tingkat kepadatan 3.718 jiwa per km², Kapanewon Kasihan sebesar 3.411 jiwa per km², dan Kapanewon Bantul sebesar 3.077 jiwa per km².

Di sisi lain, wilayah yang paling lengang penduduknya adalah Kapanewon Dlingo, dengan kepadatan hanya 682 jiwa per km². Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Dlingo yang didominasi kawasan perbukitan. Kapanewon lain yang

juga memiliki rasio kepadatan tergolong rendah di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pajangan dengan kepadatan 1.156 jiwa per km², Kapanewon Kretek sebesar 1.169 jiwa per km², dan Kapanewon Imogiri sebesar 1.188 jiwa per km².



Gambar 4.6 Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

4.1.7 Angka Pertumbuhan Penduduk

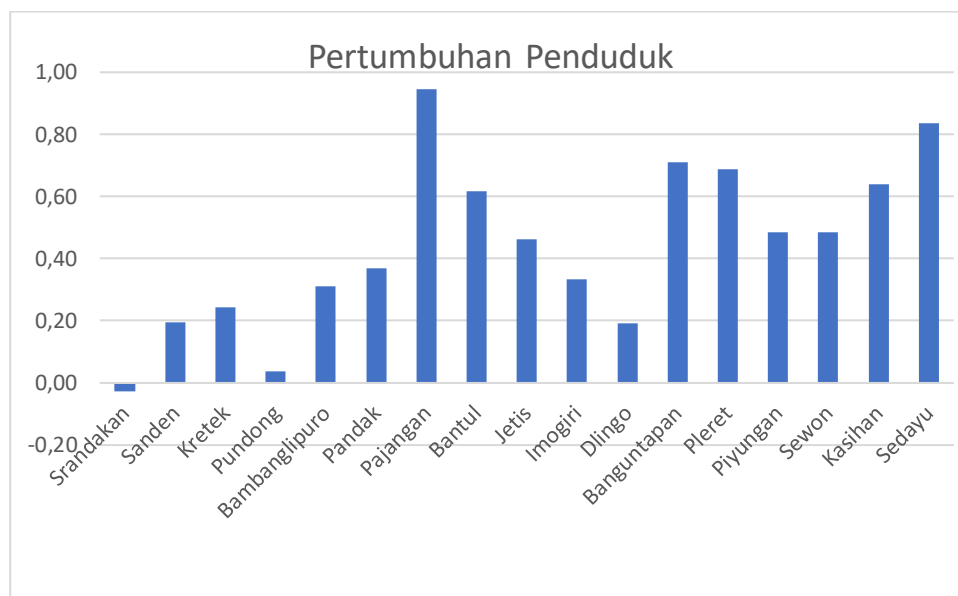
Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan tingkat pertambahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan alamiah maupun migrasi. Indikator laju pertumbuhan ini sangat berguna untuk memproyeksikan kecenderungan jumlah penduduk di masa mendatang. Berdasarkan Tabel 4.9, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul pada periode 2024–2025 tercatat sebesar 0,50 persen. Angka pertumbuhan ini menunjukkan adanya indikasi perlambatan jika dibandingkan dengan tren angka pertumbuhan pada periode-periode sebelumnya.

Tabel 4.9 Angka Pertumbuhan Penduduk Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	2024		2025		Selisih 2024- 2025	Angka Pertumbu han Penduduk
	Jumlah Pendudu k	Prese n tase	Jumlah Pendudu k	Prese n tase		
Srandakan	31.179	3,18	31.171	3,16	-8	-0,03
Sanden	31.883	3,25	31.945	3,24	62	0,19
Kretek	30.866	3,15	30.941	3,14	75	0,24
Pundong	36.331	3,71	36.344	3,69	13	0,04
Bambanglipuro	42.153	4,30	42.284	4,29	131	0,31
Pandak	52.732	5,38	52.927	5,37	195	0,37
Pajangan	38.113	3,89	38.473	3,91	360	0,94
Bantul	66.705	6,80	67.116	6,81	411	0,62
Jetis	59.962	6,12	60.240	6,11	278	0,46
Imogiri	65.013	6,63	65.229	6,62	216	0,33
Dlingo	40.524	4,13	40.602	4,12	78	0,19
Banguntapan	117.875	12,02	118.712	12,05	837	0,71
Pleret	50.191	5,12	50.536	5,13	345	0,69
Piyungan	54.691	5,58	54.957	5,58	266	0,49
Sewon	103.238	10,53	103.738	10,53	500	0,48
Kasihan	108.779	11,10	109.474	11,11	695	0,64
Sedayu	50.034	5,10	50.453	5,12	419	0,84
Jumlah	980.269	100	985.142	100	4.873	0,50

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan rincian pada Tabel 4.9 dan Gambar 4.7, dapat diketahui sebaran laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul menurut wilayah kapanewon. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa hampir seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul mencatatkan angka laju pertumbuhan yang positif. Hal ini berarti selama rentang tahun 2024 menuju 2025, mayoritas kapanewon di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan jumlah penduduk secara umum.



Gambar 4.7 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Merujuk pada tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul secara agregat adalah sebesar 0,50 persen. Hampir seluruh wilayah mengalami pertumbuhan positif, kecuali Kapanewon Srandakan yang mencatatkan laju pertumbuhan minus atau negatif sebesar -0,03 persen akibat pengurangan jumlah penduduk. Kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kabupaten Bantul saat ini adalah Kapanewon Pajangan, yakni mencapai 0,94 persen. Posisi tersebut disusul oleh Kapanewon Sedayu dan Kapanewon Banguntapan yang secara berturut-turut mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 0,84 persen dan 0,71 persen. Sementara itu, untuk wilayah yang mencatatkan laju pertumbuhan penduduk positif paling rendah adalah Kapanewon Pundong dengan angka 0,04 persen.

4.2 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Pembahasan terkait komposisi penduduk menurut Karakteristik sosial meliputi penjabaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, agama, status perkawinan, dan kondisi kecacatan.

4.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan di Kabupaten Bantul pada tahun 2025. Informasi ini disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel, guna menunjukkan Karakteristik demografi sekaligus memberikan gambaran mengenai pencapaian pembangunan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Kondisi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada pada tingkat pendidikan SLTP ke bawah. Berdasarkan Tabel 4.10, proporsi penduduk pada kelompok SLTP ke bawah mencapai 59,03 persen. Jika dirinci lebih lanjut, tamatan SLTA/ sederajat mendominasi dengan jumlah terbanyak, yakni 287.919 jiwa atau sekitar 29,23 persen dari total penduduk. Penduduk yang tidak/ belum sekolah dan tamat SD/ sederajat menempati proporsi terbesar berikutnya, yaitu masing-masing sebesar 19,40 persen dan 17,20 persen. Sementara itu, proporsi terendah ditempati oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Strata III, yakni hanya sebesar 0,06 persen.

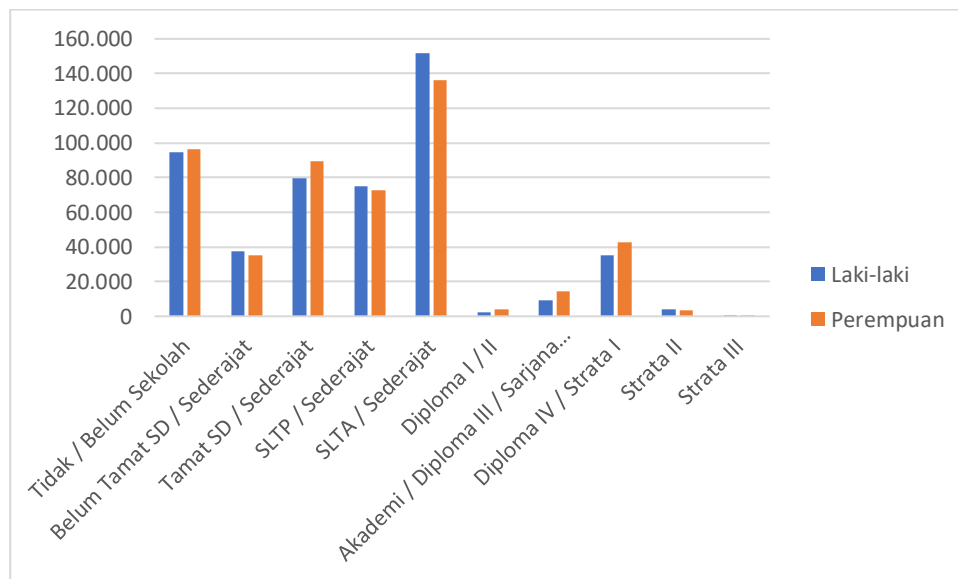
Meskipun secara umum tingkat pendidikan penduduk masih terpusat pada jenjang SLTP ke bawah, kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul terus menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terindikasi dari naiknya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan jenjang atas (SLTA ke atas). Pada tahun 2024, proporsi penduduk dengan jenjang pendidikan SLTA ke atas berada di angka 40,54 persen, dan pada tahun 2025 angka tersebut berhasil meningkat menjadi 40,97 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen.

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Pendidikan	Penduduk					
	L		P		L + P	
	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase
Tidak / Belum Sekolah	94.710	19,31	96.391	19,49	191.101	19,40
Belum Tamat SD / Sederajat	37.756	7,70	35.441	7,17	73.197	7,43
Tamat SD / Sederajat	79.767	16,26	89.634	18,12	169.401	17,20
SLTP / Sederajat	75.166	15,32	72.569	14,67	147.735	15,00
SLTA / Sederajat	151.938	30,97	135.981	27,50	287.919	29,23
Diploma I / II	2.514	0,51	3.997	0,81	6.511	0,66
Akademi / Diploma III / Sarjana Muda	9.052	1,85	14.323	2,90	23.375	2,37
Diploma IV / Strata I	35.405	7,22	42.574	8,61	77.979	7,92
Strata II	3.867	0,79	3.459	0,70	7.326	0,74
Strata III	402	0,08	196	0,04	598	0,06
Jumlah	490.577	100	494.565	100	985.142	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Berdasarkan rincian Tabel 4.10 dan visualisasi Gambar 4.8, tinjauan menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini tercermin dari proporsi laki-laki berpendidikan SLTA ke atas yang mencapai 41,41 persen, sedangkan proporsi perempuan pada jenjang yang sama sebesar 40,55 persen. Sebaliknya, pada kelompok pendidikan SLTP ke bawah, persentase penduduk perempuan lebih mendominasi, yaitu sebesar 59,45 persen dibandingkan penduduk laki-laki yang tercatat sebesar 58,59 persen.



Gambar 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 yang disajikan per kapanewon dalam bentuk tabel. Berdasarkan agama dan kepercayaannya, penduduk di Kabupaten Bantul tercatat paling banyak beragama Islam, yaitu 946.271 jiwa atau sekitar 96,05 persen (Tabel 4.11). Penduduk pemeluk agama Katolik merupakan kelompok paling banyak kedua dengan jumlah 24.880 jiwa atau sekitar 2,53 persen. Pemeluk agama Kristen merupakan kelompok ketiga terbanyak di Kabupaten Bantul, yaitu 12.937 jiwa atau sekitar 1,31 persen. Penduduk beragama Hindu dan Budha adalah kelompok dengan proporsi yang jauh lebih sedikit. Jumlah pemeluk agama Hindu di Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 779 jiwa (0,08 persen), sedangkan pemeluk agama Budha tercatat sebanyak 228 jiwa (0,02 persen).

Apabila dilihat menurut kapanewon, sebaran pemeluk agama Islam paling banyak berada di Kapanewon Banguntapan yaitu 111.046 jiwa, dan paling sedikit berada di Kapanewon Kretek yaitu 29.917 jiwa. Pemeluk agama Kristen

terbanyak juga berada di Kapanewon Banguntapan yaitu 3.275 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kapanewon Sanden dengan 48 jiwa. Untuk agama Katolik, pemeluk terbanyak berada di wilayah Kapanewon Kasihan sejumlah 5.195 jiwa, dan paling sedikit berada di Kapanewon Dlingo sebanyak 13 jiwa. Di sisi lain, pemeluk agama Hindu dan Budha menempati jumlah yang sangat minim di setiap wilayah. Pemeluk Hindu paling banyak bermukim di Kapanewon Banguntapan sejumlah 474 jiwa, sedangkan yang paling sedikit tercatat di Kapanewon Sanden dan Dlingo yang masing-masing hanya 1 jiwa. Bahkan, Kapanewon Pundong, Jetis, dan Imogiri sama sekali tidak memiliki penduduk beragama Hindu pada tahun 2025. Sementara itu, penduduk beragama Budha terbanyak bermukim di Kapanewon Kasihan sejumlah 101 jiwa, sedangkan di Kapanewon Srandakan, Sanden, Pundong, Jetis, dan Dlingo tidak ada penduduk yang memeluk agama Budha.

Pemeluk agama Konghucu di Kabupaten Bantul tercatat hanya ada 1 jiwa, yakni di Kapanewon Pandak. Sedangkan penganut aliran Kepercayaan paling banyak berada di Kapanewon Sewon sebanyak 10 jiwa, dan paling sedikit (yakni masing-masing 2 jiwa) berada di Kapanewon Bantul, Jetis, Dlingo, dan Banguntapan. Di wilayah lainnya seperti Kapanewon Srandakan, Sanden, Pundong, Bambanglipuro, Pleret, Piyungan, dan Sedayu, tidak ada penduduk yang menganut aliran Kepercayaan pada tahun 2025.

Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Islam			Kristen			Katolik			Hindu		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Srandakan	15.380	15.530	30.910	40	34	74	83	99	182	3	2	5
Sanden	15.652	16.046	31.698	18	30	48	102	96	198	1	0	1
Kretek	14.761	15.156	29.917	115	146	261	345	398	743	9	6	15
Pundong	17.562	17.801	35.363	262	277	539	203	239	442	0	0	0
Bambanglipuro	18.979	19.197	38.176	176	185	361	1.770	1.961	3.731	4	7	11
Pandak	25.705	25.287	50.992	173	221	394	716	810	1.526	2	5	7
Pajangan	18.889	18.792	37.681	162	169	331	221	224	445	3	4	7
Bantul	31.813	32.256	64.069	425	452	877	1.052	1.104	2.156	6	2	8
Jetis	29.403	29.409	58.812	469	506	975	215	236	451	0	0	0
Imogiri	32.005	32.429	64.434	112	131	243	257	289	546	0	0	0
Dlingo	20.153	20.363	40.516	29	41	70	6	7	13	0	1	1
Banguntapan	55.167	55.879	111.046	1.596	1.679	3.275	1.882	1.974	3.856	243	231	474
Pleret	25.344	25.001	50.345	33	36	69	58	46	104	6	10	16
Piyungan	26.890	27.130	54.020	191	195	386	265	268	533	4	2	6
Sewon	50.132	50.013	100.145	643	652	1.295	1.004	1.161	2.165	48	46	94
Kasihan	50.639	50.602	101.241	1.395	1.420	2.815	2.453	2.742	5.195	59	54	113
Sedayu	23.369	23.537	46.906	440	484	924	1.278	1.316	2.594	11	10	21
Jumlah	471.843	474.428	946.271	6.279	6.658	12.937	11.910	12.970	24.880	399	380	779

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Lanjutan Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Budha			Konghucu			Kepercayaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Srandakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kretek	2	0	2	0	0	0	2	1	3
Pundong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bambanglipuro	2	3	5	0	0	0	0	0	0
Pandak	0	1	1	1	0	1	3	3	6
Pajangan	1	2	3	0	0	0	2	4	6
Bantul	2	2	4	0	0	0	2	0	2
Jetis	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Imogiri	2	0	2	0	0	0	2	2	4
Dlingo	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Banguntapan	29	30	59	0	0	0	1	1	2
Pleret	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Piyungan	4	8	12	0	0	0	0	0	0
Sewon	17	12	29	0	0	0	8	2	10
Kasihan	53	48	101	0	0	0	5	4	9
Sedayu	4	4	8	0	0	0	0	0	0
Jumlah	117	111	228	1	0	1	28	18	46

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Berdasarkan Tabel 4.11 menurut klasifikasi jenis kelaminnya, jumlah laki-laki maupun perempuan pemeluk agama Islam paling banyak bermukim di Kapanewon Banguntapan, yakni masing-masing sebanyak 55.167 jiwa laki-laki dan 55.879 jiwa perempuan. Demikian halnya dengan pemeluk agama Kristen dan Hindu, populasi laki-laki dan perempuannya didominasi di Kapanewon Banguntapan. Sementara itu, pemeluk agama Katolik dan Budha, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki basis jumlah terbanyak di Kapanewon Kasihan.

4.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana kependudukan, terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran, dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan di Kabupaten Bantul tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berstatus kawin lebih banyak dibandingkan penduduk belum kawin, cerai hidup, dan cerai mati.

Berdasarkan Tabel 4.12, proporsi penduduk kawin di Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah 50,83 persen. Jumlah penduduk laki-laki pada status kawin hampir berimbang dengan jumlah penduduk perempuan, namun sedikit lebih banyak didominasi oleh penduduk perempuan (50,29 persen). Apabila dilihat menurut kapanewon, wilayah dengan jumlah penduduk berstatus kawin paling banyak adalah Kapanewon Banguntapan yaitu 58.029 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk berstatus kawin paling sedikit berada di Kapanewon Srandakan yaitu 15.917 jiwa.

Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Belum Kawin			Kawin			Cerai Hidup			Cerai Mati		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Srandakan	6.753	5.582	12.335	7.908	8.009	15.917	233	290	523	612	1.784	2.396
Sanden	6.586	5.712	12.298	8.329	8.393	16.722	241	283	524	617	1.784	2.401
Kretek	6.358	5.382	11.740	8.082	8.179	16.261	219	253	472	575	1.893	2.468
Pundong	7.613	6.425	14.038	9.512	9.640	19.152	270	298	568	632	1.954	2.586
Bambanglipuro	9.079	7.673	16.752	10.793	10.990	21.783	293	352	645	766	2.338	3.104
Pandak	11.600	9.428	21.028	13.635	13.741	27.376	432	438	870	933	2.720	3.653
Pajangan	8.391	7.064	15.455	10.004	10.129	20.133	275	321	596	608	1.681	2.289
Bantul	15.001	12.792	27.793	16.717	16.948	33.665	522	712	1.234	1.060	3.364	4.424
Jetis	13.387	11.131	24.518	15.188	15.385	30.573	435	548	983	1.079	3.087	4.166
Imogiri	13.847	11.712	25.559	17.003	17.149	34.152	488	606	1.094	1.040	3.384	4.424
Dlingo	7.895	6.332	14.227	11.361	11.504	22.865	394	430	824	539	2.147	2.686
Banguntapan	27.584	23.971	51.555	28.819	29.210	58.029	952	1.430	2.382	1.563	5.183	6.746
Pleret	11.744	9.705	21.449	12.560	12.588	25.148	384	527	911	754	2.274	3.028
Piyungan	12.194	10.354	22.548	13.955	14.092	28.047	408	547	955	797	2.610	3.407
Sewon	23.678	19.865	43.543	25.577	25.868	51.445	893	1.216	2.109	1.704	4.937	6.641
Kasihan	25.158	21.190	46.348	26.783	27.065	53.848	1.037	1.390	2.427	1.626	5.225	6.851
Sedayu	11.173	9.460	20.633	12.713	12.915	25.628	406	501	907	810	2.475	3.285
Jumlah	218.041	183.778	401.819	248.939	251.805	500.744	7.882	10.142	18.024	15.715	48.840	64.555

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Proporsi penduduk belum kawin di Kabupaten Bantul menempati angka 40,79 persen dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki belum kawin tercatat lebih banyak (54,26 persen) dibandingkan penduduk perempuan belum kawin. Apabila dilihat per kapanewon, seluruh kapanewon memiliki proporsi penduduk laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan untuk status ini. Kapanewon dengan jumlah penduduk belum kawin terbanyak adalah Kapanewon Banguntapan, yaitu 51.555 jiwa. Sementara itu, kapanewon dengan jumlah penduduk belum kawin paling sedikit adalah Kapanewon Kretek yaitu 11.740 jiwa.

Penduduk berstatus cerai hidup di Kabupaten Bantul memiliki proporsi paling kecil dibanding yang lain yaitu 1,83 persen, di mana terjadi kenaikan persentase dari tahun sebelumnya (2024) yang sebesar 1,73 persen menjadi 1,83 persen pada tahun 2025. Pada status pernikahan cerai hidup, kelompok penduduk yang dominan adalah perempuan dengan proporsi mencapai 56,27 persen. Berdasarkan Tabel 4.12, terlihat bahwa penduduk perempuan mendominasi pada status perkawinan ini di seluruh wilayah kapanewon. Penduduk berstatus cerai hidup paling banyak berada di Kapanewon Kasihan yaitu 2.427 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Kapanewon Kretek yaitu 472 jiwa dan Kapanewon Srandakan yaitu 523 jiwa.

Penduduk dengan status cerai mati di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 memiliki proporsi 6,55 persen dari total jumlah penduduk. Penduduk perempuan kembali mendominasi pada status perkawinan ini, dengan proporsi mencapai 75,66 persen. Berdasarkan pembagian kapanewon, jumlah penduduk berstatus cerai mati paling banyak adalah Kapanewon Kasihan yaitu 6.851 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kapanewon Pajangan yaitu 2.289 jiwa. Lebih dominannya jumlah penduduk perempuan pada dua status perkawinan, yaitu cerai hidup dan cerai mati, menunjukkan bahwa perempuan di wilayah ini secara umum memiliki tingkat harapan dan kemampuan bertahan hidup yang lebih panjang meskipun hidup sendiri atau ditinggal pasangan apabila dibandingkan dengan laki-laki.

Penduduk menurut status perkawinan juga dapat dijelaskan lebih lanjut melalui beberapa indikator lain seperti angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum, angka perceraian kasar, dan angka perceraian umum.

4.2.3.1 Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun di suatu periode tertentu. Berdasarkan Tabel 4.13, pada tahun 2025 angka perkawinan kasar di Kabupaten Bantul tercatat sebesar 509,75. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk di Kabupaten Bantul, terdapat sekitar 510 orang yang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk berstatus kawin tanpa memedulikan urutan perkawinan maupun umur pelaku perkawinan tersebut, baik yang sudah cukup dewasa untuk kawin ataupun belum. Jika dilihat menurut wilayahnya, Kapanewon Dlingo merupakan kapanewon yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, yakni sebesar 563,55. Adapun angka perkawinan kasar terendah tercatat di Kapanewon Banguntapan, yaitu sebesar 490,85.

Tabel 4.13 Angka Perkawinan Kasar di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025

KAPANEWON	Jumlah Penduduk				Angka Perkawinan kasar
	Status Kawin	Tahun 2024	Tahun 2025	Tengah tahun 2025	
Srandakan	15.917	31.179	31.171	31.161	510,80
Sanden	16.722	31.883	31.945	31.938	523,58
Kretek	16.261	30.866	30.941	30.908	526,11
Pundong	19.152	36.331	36.344	36.316	527,37
Bambanglipuro	21.783	42.153	42.284	42.261	515,44
Pandak	27.376	52.732	52.927	52.808	518,41
Pajangan	20.133	38.113	38.473	38.277	525,98
Bantul	33.665	66.705	67.116	66.903	503,19
Jetis	30.573	59.962	60.240	60.062	509,02
Imogiri	34.152	65.013	65.229	65.120	524,45
Dlingo	22.865	40.524	40.602	40.573	563,55
Banguntapan	58.029	117.875	118.712	118.222	490,85
Pleret	25.148	50.191	50.536	50.392	499,05
Piyungan	28.047	54.691	54.957	54.710	512,65
Sewon	51.445	103.238	103.738	103.319	497,92
Kasihani	53.848	108.779	109.474	109.113	493,51
Sedayu	25.628	50.034	50.453	50.244	510,07
Total	500.744	980.269	985.142	982.327	509,75

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

4.2.3.2 Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum (AKU) menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar, karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara itu, penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Berdasarkan Tabel 4.14, angka perkawinan umum di Kabupaten Bantul tercatat sebesar 626,37. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk berusia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 626 hingga 627 penduduk berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Angka perkawinan umum tertinggi berada di Kapanewon Dlingo dengan angka 684,66. Sebaliknya, angka perkawinan umum terendah berada di Kapanewon Kasihan dengan angka 608,73.

Tabel 4.14 Angka Perkawinan Umum di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025

Kapanewon	Jumlah Penduduk				Angka Perkawinan Umum
	Status kawin	Tahun 2024 15 tahun ke atas	Tahun 2025 15 tahun ke atas	Tengah tahun 2025 15 tahun ke atas	
Srandakan	15.917	25.476	25.658	25.785	617,30
Sanden	16.722	26.212	26.442	26.584	629,02
Kretek	16.261	25.337	25.562	25.691	632,95
Pundong	19.152	29.334	29.558	29.692	645,02
Bambanglipuro	21.783	34.407	34.769	34.937	623,49
Pandak	27.376	42.903	43.379	43.542	628,73
Pajangan	20.133	30.424	30.958	31.006	649,33
Bantul	33.665	53.619	54.338	54.468	618,07
Jetis	30.573	48.085	48.621	48.761	627,00
Imogiri	34.152	52.019	52.623	52.847	646,24
Dlingo	22.865	32.900	33.220	33.396	684,66
Banguntapan	58.029	93.366	94.857	95.091	610,25
Pleret	25.148	39.394	39.958	40.114	626,91
Piyungan	28.047	43.405	44.026	44.099	636,00
Sewon	51.445	82.780	83.800	83.992	612,50
Kasihan	53.848	87.077	88.239	88.459	608,73
Sedayu	25.628	40.277	40.902	40.975	625,45
Total	500.744	787.015	796.910	799.439	626,37

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

4.2.3.3 Angka Perceraian Kasar

Angka perceraian kasar menunjukkan persentase penduduk yang memiliki status cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun

untuk suatu tahun tertentu. Adanya perceraian ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi tingkat fertilitas. Secara keseluruhan, angka perceraian kasar di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 tercatat sebesar 18,35. Artinya, dari tiap 1.000 penduduk, terdapat sekitar 18 kasus perceraian. Angka perceraian terendah berada di Kapanewon Bambanglipuro dengan angka 15 kali perceraian per 1.000 penduduk. Sedangkan angka perceraian tertinggi tercatat di Kapanewon Kasihan, yakni mencapai 22 kali perceraian per 1.000 penduduk. Informasi lebih mendetail mengenai angka perceraian kasar menurut kapanewon di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 Angka Perceraian Kasar di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025

KAPANEWON	Jumlah Penduduk				Angka Perceraian kasar
	Status Cerai Hidup	Tahun 2024	Tahun 2025	Tengah tahun 2025	
Srandakan	523	31.179	31.171	31.161	16,78
Sanden	524	31.883	31.945	31.938	16,41
Kretek	472	30.866	30.941	30.908	15,27
Pundong	568	36.331	36.344	36.316	15,64
Bambanglipuro	645	42.153	42.284	42.261	15,26
Pandak	870	52.732	52.927	52.808	16,47
Pajangan	596	38.113	38.473	38.277	15,57
Bantul	1.234	66.705	67.116	66.903	18,44
Jetis	983	59.962	60.240	60.062	16,37
Imogiri	1.094	65.013	65.229	65.120	16,80
Dlingo	824	40.524	40.602	40.573	20,31
Banguntapan	2.382	117.875	118.712	118.222	20,15
Pleret	911	50.191	50.536	50.392	18,08
Piyungan	955	54.691	54.957	54.710	17,46
Sewon	2.109	103.238	103.738	103.319	20,41
Kasihan	2.427	108.779	109.474	109.113	22,24
Sedayu	907	50.034	50.453	50.244	18,05
Total	18.024	980.269	985.142	982.327	18,35

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

4.2.3.4 Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum merupakan angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk yang terkena risiko perceraian). Berdasarkan Tabel 4.16, pada tahun 2025, angka perceraian umum di Kabupaten Bantul menunjukkan angka 22,55. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas, terjadi 22 hingga 23 kasus perceraian. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk berstatus cerai hidup perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup tercatat sebesar 10.142 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki tercatat sebesar 7.882 jiwa.

Tabel 4.16 Angka Perceraian Umum di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2025

KAPANEWON	Jumlah Penduduk				Angka Perceraian Umum
	Status Cerai Hidup	Tahun 2024 >15 th	Tahun 2025 >15 th	Tengah tahun 2025 >15 th	
Srandakan	523	25.476	25.658	25.785	20,28
Sanden	524	26.212	26.442	26.584	19,71
Kretek	472	25.337	25.562	25.691	18,37
Pundong	568	29.334	29.558	29.692	19,13
Bambanglipuro	645	34.407	34.769	34.937	18,46
Pandak	870	42.903	43.379	43.542	19,98
Pajangan	596	30.424	30.958	31.006	19,22
Bantul	1.234	53.619	54.338	54.468	22,66
Jetis	983	48.085	48.621	48.761	20,16
Imogiri	1.094	52.019	52.623	52.847	20,70
Dlingo	824	32.900	33.220	33.396	24,67
Banguntapan	2.382	93.366	94.857	95.091	25,05
Pleret	911	39.394	39.958	40.114	22,71
Piyungan	955	43.405	44.026	44.099	21,66
Sewon	2.109	82.780	83.800	83.992	25,11
Kasihan	2.427	87.077	88.239	88.459	27,44
Sedayu	907	40.277	40.902	40.975	22,14
Total	18.024	787.015	796.910	799.439	22,55

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan angka perceraian umum di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2024, angka perceraian umum tercatat sebesar 21,43, yang berarti selama satu tahun terakhir telah terjadi peningkatan sebesar 1,12 poin. Tren ini hendaknya menjadi perhatian khusus bagi Kabupaten Bantul demi menjaga ketahanan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konseling intensif yang mengedepankan empati bagi pasangan selama proses mediasi agar angka perceraian dapat diminimalkan.

4.2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Jumlah penduduk menurut kecacatan penting diketahui untuk memperkirakan jumlah kesempatan kerja dan penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Tabel 4.17, pada tahun 2025 di Kabupaten Bantul terdapat sebanyak 4.058 penyandang disabilitas, yang terdiri dari 58,87 persen laki-laki dan 41,13 persen perempuan. Penyandang cacat paling banyak di Kabupaten Bantul adalah kategori cacat mental/jiwa. Jumlah penyandang cacat mental ini mencapai 2.163 orang atau sekitar 53,30 persen. Sementara itu, kelompok dengan jumlah paling sedikit adalah penyandang cacat netra/buta yakni sebanyak 230 orang atau 5,67 persen.

Tabel 4.17 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bantul Menurut Kecacatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jenis Disabilitas	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
		Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase
1	Cacat fisik	265	11,09	201	12,04	466	11,48
2	Cacat netra/buta	120	5,02	110	6,59	230	5,67
3	Cacat rungu/ wicara	356	14,90	305	18,27	661	16,29
4	Cacat mental/jiwa	1.381	57,81	782	46,85	2.163	53,30
5	Cacat fisik dan jiwa	128	5,36	122	7,31	250	6,16
6	Cacat lainnya	139	5,82	149	8,93	288	7,10
	JUMLAH	2.389	100	1.669	100	4.058	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Berdasarkan jenis kelaminnya, penyandang disabilitas laki-laki adalah yang paling banyak di Kabupaten Bantul, yaitu 2.389 orang. Penyandang cacat laki-laki

paling banyak menderita cacat mental/jiwa (57,81 persen) dan cacat rungu/wicara (14,90 persen). Begitu halnya dengan penyandang cacat perempuan, yang juga paling banyak menderita cacat mental/jiwa (46,85 persen) dan cacat rungu/wicara (18,27 persen).

4.3 Keluarga

Menurut Departemen Kesehatan RI (1988), keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 mendefinisikan keluarga sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materiil secara layak, bertakwa kepada Tuhan, serta memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Berdasarkan rumusan dari Depkes dan BKKBN tersebut, definisi keluarga dapat disederhanakan sebagai sekumpulan orang yang bermukim di dalam satu rumah dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau darah akibat ikatan perkawinan, kelahiran, maupun adopsi.

Terkait dengan bentuknya, Sudiharto (2007) menjelaskan bahwa struktur keluarga yang dikenal secara umum di masyarakat kita terbagi menjadi dua, yakni keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, beserta anak-anak (baik anak kandung maupun adopsi) yang belum kawin, atau salah satu orang tua (ayah tunggal atau ibu tunggal) beserta anak-anak yang belum kawin. Di sisi lain, keluarga luas atau keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga yang tidak hanya mencakup susunan inti, melainkan juga terdiri dari anak-anak yang sudah kawin, cucu, orang tua, mertua, maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Sebagai indikator demografi, kondisi keluarga pada penjabaran selanjutnya akan digambarkan melalui beberapa parameter pengukuran. Parameter tersebut meliputi jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, serta Karakteristik kepala keluarga yang ditinjau secara rinci berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, jenjang pendidikan, hingga status pekerjaannya.

4.3.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga. Hal ini didasarkan atas asumsi semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil.

Perkembangan jumlah keluarga di Kabupaten Bantul dari tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan data konsolidasi Semester 2 Tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri, jumlah kepala keluarga di Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 350.563 KK dengan jumlah penduduk 985.142 jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3.360 KK dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024 yang tercatat sebanyak 347.203 KK dengan jumlah penduduk 980.269 jiwa.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bantul berkisar antara 2 hingga 3 orang. Antara tahun 2024 dan 2025, tidak menunjukkan perubahan yang nyata untuk rata-rata jumlah anggota keluarga ini. Pada tahun 2024, rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bantul sekitar 2,82 sedangkan pada tahun 2025 rata-rata jumlah anggota keluarga turun tipis menjadi 2,81. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keluarga di Kabupaten Bantul termasuk keluarga inti yang kurang lebih terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Tabel 4.18 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025

Kapanewon	Jumlah Penduduk		Jumlah Kk		Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Srandakan	31.179	31.171	11.329	11.414	2,75	2,73
Sanden	31.883	31.945	11.839	11.907	2,69	2,68
Kretek	30.866	30.941	11.444	11.534	2,70	2,68
Pundong	36.331	36.344	13.071	13.164	2,78	2,76
Bambanglipuro	42.153	42.284	15.556	15.684	2,71	2,70
Pandak	52.732	52.927	19.093	19.263	2,76	2,75
Pajangan	38.113	38.473	13.107	13.278	2,91	2,90
Bantul	66.705	67.116	23.896	24.156	2,79	2,78
Jetis	59.962	60.240	21.568	21.811	2,78	2,76
Imogiri	65.013	65.229	23.194	23.380	2,80	2,79
Dlingo	40.524	40.602	14.404	14.478	2,81	2,80
Banguntapan	117.875	118.712	40.307	40.755	2,92	2,91
Pleret	50.191	50.536	17.167	17.369	2,92	2,91
Piyungan	54.691	54.957	18.995	19.172	2,88	2,87
Sewon	103.238	103.738	36.457	36.771	2,83	2,82
Kasihan	108.779	109.474	38.142	38.582	2,85	2,84
Sedayu	50.034	50.453	17.634	17.845	2,84	2,83
	980.269	985.142	347.203	350.563	2,82	2,81

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Apabila dilihat menurut cakupan wilayah per kapanewon, jumlah kepala keluarga paling banyak tahun 2025 adalah Kapanewon Banguntapan yaitu 40.755 KK. Sementara itu jumlah kepala keluarga yang paling sedikit tahun 2025 adalah 11.414 KK di Kapanewon Srandakan. Apabila melihat kondisi jumlah penduduk, Kapanewon Kretek adalah kapanewon yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit namun jumlah KK di Kretek sedikit lebih banyak dibanding dengan di Kapanewon Srandakan yang memiliki jumlah penduduk 31.171 jiwa. Hal ini dapat terjadi apabila melihat rata-rata jumlah anggota keluarganya. Meskipun jumlah penduduk Kapanewon Srandakan lebih besar dibanding Kapanewon Kretek, namun karena rata-rata jumlah anggota keluarga

di Kapanewon Srandakan lebih besar yakni 2,73 jiwa per keluarga, maka akumulasi jumlah KK menjadi lebih sedikit.

Rata-rata jumlah anggota keluarga yang paling banyak tahun 2025 adalah 2,91 jiwa di Kapanewon Banguntapan dan Pleret, serta 2,90 jiwa yaitu di Kapanewon Pajangan. Hal ini berarti dalam satu keluarga di Kapanewon Banguntapan, Pleret, dan Pajangan memiliki rata-rata 3 orang anggota keluarga. Pada tahun 2025, rata-rata jumlah anggota keluarga yang paling sedikit terdapat di Kapanewon Sanden dan Kretek yaitu 2,68 jiwa. Hal ini dapat dimaknai bahwa terdapat 2 hingga 3 orang dalam satu keluarga di Kapanewon Sanden dan Kretek pada tahun 2025.

4.3.2 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dalam keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*), dan pola asuh anak dalam suatu keluarga. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, famili lain, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu. Status hubungan dengan kepala keluarga yaitu anak memiliki persentase terbesar baik pada tahun 2024 maupun 2025, yaitu 38,52 persen dan 38,46 persen. Sementara itu, status suami memiliki persentase yaitu 0,0013 persen pada tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah laki-laki sebagai kepala keluarga meningkat menjadi 278.402 jiwa.

Tabel 4.19 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin Tahun 2024 – 2025

Status Hubungan	Penduduk 2024			Penduduk 2025		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Kepala Keluarga	276.302	70.901	347.203	278.402	72.161	350.563
Suami	12	0	12	13	0	13
Istri	0	237.800	237.800	0	238.828	238.828
Anak	204.026	173.572	377.598	204.591	174.280	378.871
Menantu	57	111	168	55	99	154
Cucu	2.838	2.443	5.281	2.661	2.267	4.928
Orang Tua	329	2.029	2.358	295	1.859	2.154
Mertua	165	957	1.122	157	875	1.032
Famili Lain	3.948	3.774	7.722	3.832	3.593	7.425
Pembantu	1	2	3	0	2	2
Lainya	484	518	1.002	571	601	1.172
Jumlah	488.162	492.107	980.269	490.577	494.565	985.142

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jumlah perempuan sebagai kepala keluarga juga mengalami peningkatan dari tahun 2024–2025. Pada tahun 2024, jumlah perempuan sebagai KK adalah 70.901 jiwa. Sementara itu pada tahun 2025, jumlah perempuan sebagai kepala keluarga menjadi 72.161 jiwa. Situasi seperti ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, di antaranya adalah kepala keluarga mempunyai status perkawinan belum kawin, cerai hidup, ataupun cerai mati. Ada kemungkinan juga bahwa suami/istri tidak tinggal dalam satu tempat (bekerja di luar daerah).

4.3.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan, dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Tabel 4.20 menunjukkan bahwa proporsi perempuan sebagai kepala keluarga di Kabupaten Bantul pada rentang tahun 2024 hingga 2025 tergolong rendah karena hanya sekitar 20 persen. Sekitar 80 persen kepala keluarga di Bantul berjenis kelamin laki-laki. Hal ini merupakan suatu kewajaran di masyarakat kita, mengingat

budaya patriarki yang masih melekat. Laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab penuh terhadap ekonomi rumah tangga.

Tabel 4.20 Jumlah kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon Tahun 2024 – 2025

KAPANEWON	2024			2025		
	L	P	L+P	L	P	L+P
SRANDAKAN	8.886	2.443	11.329	8.926	2.488	11.414
SANDEN	9.339	2.500	11.839	9.393	2.514	11.907
KRETEK	8.929	2.515	11.444	8.995	2.539	11.534
PUNDONG	10.518	2.553	13.071	10.537	2.627	13.164
BAMBANG LIPURO	12.080	3.476	15.556	12.174	3.510	15.684
PANDAK	15.263	3.830	19.093	15.353	3.910	19.263
PAJANGAN	10.885	2.222	13.107	11.021	2.257	13.278
BANTUL	18.662	5.234	23.896	18.800	5.356	24.156
JETIS	17.005	4.563	21.568	17.173	4.638	21.811
IMOGIRI	18.660	4.534	23.194	18.761	4.619	23.380
DLINGO	12.155	2.249	14.404	12.207	2.271	14.478
BANGUNTAPAN	31.806	8.501	40.307	32.143	8.612	40.755
PLERET	13.933	3.234	17.167	14.038	3.331	17.369
PIYUNGAN	15.325	3.670	18.995	15.448	3.724	19.172
SEWON	28.786	7.671	36.457	28.983	7.788	36.771
KASIHAN	29.975	8.167	38.142	30.228	8.354	38.582
SEDAYU	14.095	3.539	17.634	14.222	3.623	17.845
TOTAL	276.302	70.901	347.203	278.402	72.161	350.563

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kepala keluarga laki-laki lebih dominan dibanding kepala keluarga perempuan di seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2025, jumlah kepala keluarga laki-laki paling banyak di Kapanewon Banguntapan yaitu 32.143 KK. Hal ini juga berlaku pada kepala keluarga perempuan, di mana di Kapanewon Banguntapan tercatat 8.612 KK perempuan. Pada tahun 2025, kondisi ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, di mana Kapanewon Banguntapan tetap memiliki jumlah dan proporsi KK paling banyak baik laki-laki maupun perempuan.

4.3.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Definisi kepala keluarga dalam konsep demografi adalah seseorang yang berstatus menikah maupun tidak, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab secara ekonomi, sosial, maupun psikologis sebagai kepala keluarga. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh seorang yang belum menikah maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati. Jumlah Kepala Keluarga yang berstatus belum kawin, cerai hidup, dan cerai mati pada tahun 2024–2025 mengalami peningkatan, sementara status kawin mengalami sedikit penurunan.

Tabel 4.21 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Kapanewon Tahun 2024 – 2025

KAPANEWON	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
SRANDAKAN	452	473	8.205	8.162	438	480	2.234	2.299
SANDEN	501	524	8.578	8.568	452	490	2.308	2.325
KRETEK	415	441	8.373	8.366	405	425	2.251	2.302
PUNDONG	449	503	9.855	9.785	475	511	2.292	2.365
BAMBANG LIPURO	763	791	11.261	11.249	551	601	2.981	3.043
PANDAK	881	902	14.049	14.024	729	822	3.434	3.515
PAJANGAN	458	485	10.166	10.225	512	536	1.971	2.032
BANTUL	1.152	1.192	17.406	17.437	1.086	1.166	4.252	4.361
JETIS	949	1.039	15.761	15.735	866	938	3.992	4.099
IMOGIRI	760	789	17.403	17.393	914	997	4.117	4.201
DLINGO	261	258	11.558	11.509	687	718	1.898	1.993
BANGUNTAPAN	1.941	1.987	29.856	29.984	2.108	2.231	6.402	6.553
PLERET	630	650	12.863	12.872	792	867	2.882	2.980
PIYUNGAN	579	604	14.350	14.344	882	910	3.184	3.314
SEWON	1.726	1.782	26.571	26.542	1.928	2.008	6.232	6.439
KASIHAN	1.864	1.973	27.762	27.776	2.180	2.288	6.336	6.545
SEDAYU	760	763	13.107	13.130	766	847	3.001	3.105
TOTAL	14.541	15.156	257.124	257.101	15.771	16.835	59.767	61.471

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jumlah kepala keluarga (KK) paling banyak berstatus kawin baik pada tahun 2024 maupun 2025. Tercatat jumlah KK berstatus kawin tahun 2025

menurun dari tahun 2024 menjadi 257.101 KK. Jumlah KK cerai mati merupakan kelompok terbesar kedua di Kabupaten Bantul. Tercatat pada tahun 2025, sebanyak 61.471 KK berstatus cerai mati. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan sebanyak 1.704 KK. Jumlah kepala keluarga yang berstatus belum kawin juga mengalami kenaikan sebanyak 615 KK menjadi 15.156 KK di tahun 2025.

Apabila dilihat menurut wilayah, Kapanewon Banguntapan adalah kapanewon dengan jumlah KK berstatus kawin paling banyak pada tahun 2025 yaitu mencapai 29.984 KK. Pada tahun 2025, jumlah KK berstatus belum kawin paling banyak juga berada di Kapanewon Banguntapan dimana jumlahnya mencapai 1.987 KK. Kepala Keluarga berstatus kawin paling banyak ada di Kapanewon Banguntapan secara konsisten pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, jumlah KK dengan status cerai hidup paling banyak ada di Kapanewon Kasihan dan status cerai mati terbanyak masih tetap di Kapanewon Banguntapan.

Tabel 4.22 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Kapanewon Tahun 2025

KAPANEWON	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	L	P	L	P	L	P	L	P
SRANDAKAN	270	203	7.842	320	214	266	600	1.699
SANDEN	283	241	8.281	287	227	263	602	1.723
KRETEK	234	207	8.007	359	202	223	552	1.750
PUNDONG	283	220	9.410	375	247	264	597	1.768
BAMBANGLIPURO	439	352	10.699	550	278	323	758	2.285
PANDAK	493	409	13.534	490	416	406	910	2.605
PAJANGAN	274	211	9.936	289	245	291	566	1.466
BANTUL	674	518	16.565	872	504	662	1.057	3.304
JETIS	616	423	15.074	661	415	523	1.068	3.031
IMOGIRI	458	331	16.856	537	440	557	1.007	3.194
DLINGO	150	108	11.251	258	345	373	461	1.532
BANGUNTAPAN	1.162	825	28.544	1.440	895	1.336	1.542	5.011
PLERET	417	233	12.499	373	370	497	752	2.228
PIYUNGAN	363	241	13.904	440	396	514	785	2.529
SEWON	1.079	703	25.373	1.169	852	1.156	1.679	4.760
KASIHAN	1.133	840	26.540	1.236	980	1.308	1.575	4.970
SEDAYU	434	329	12.622	508	385	462	781	2.324
TOTAL	8.762	6.394	246.937	10.164	7.411	9.424	15.292	46.179

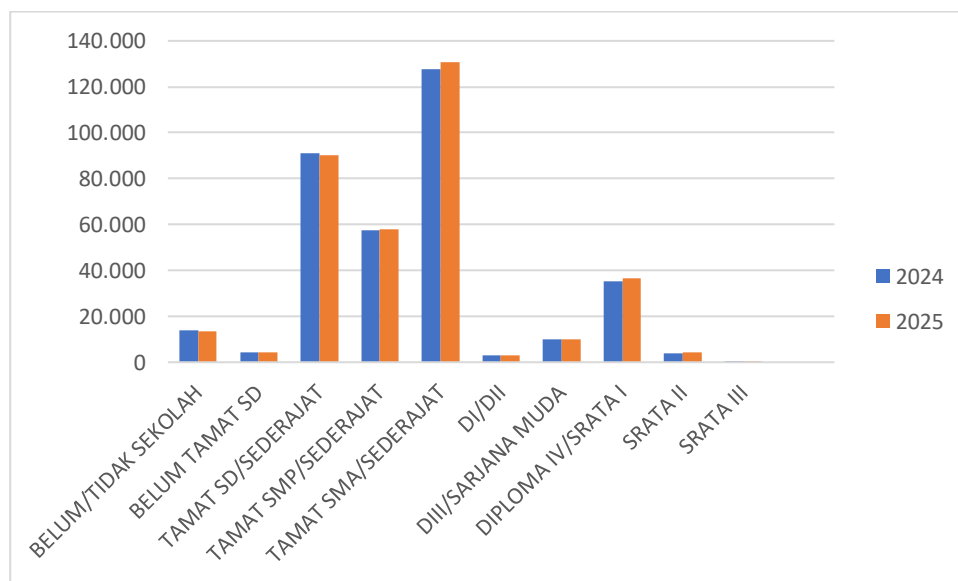
Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2025 kepala keluarga berstatus belum kawin dan kawin didominasi oleh kelompok laki-laki. Hal ini dimungkinkan berkaitan erat dengan peran laki-laki sebagai anak sekaligus pencari nafkah dalam keluarga. Kepala keluarga cerai hidup dan cerai mati didominasi oleh kelompok perempuan. Perbandingan mencolok terlihat pada kepala keluarga berstatus cerai mati dimana perempuan sebagai kepala keluarga mencapai 3 kali lipat jumlahnya dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan di Kabupaten Bantul masih cukup banyak terjadi fenomena janda yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini perlu mendapat perhatian agar keluarga dengan janda sebagai kepala keluarganya tidak terjatuh pada jerat kemiskinan. Program-program pemberdayaan perempuan dan keluarga miskin perlu untuk diberikan pada kelompok-kelompok ini.

4.3.5 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia, serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu, jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga. Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikannya paling banyak adalah tamatan SMA/ sederajat pada tahun 2024 dan 2025 yaitu 127.880 KK dan 130.815 KK. Paling banyak kedua pada tahun 2024 dan 2025 adalah tamatan SD/ sederajat yaitu sebanyak 91.085 KK dan 89.988 KK. Sementara itu, KK dengan pendidikan Strata III adalah kelompok yang paling kecil karena hanya terdiri dari 416 KK pada tahun 2024 dan 436 KK pada tahun 2025. Kondisi pendidikan kepala keluarga yang telah meningkat pada jenjang pendidikan menengah atas mengindikasikan adanya peningkatan kualitas aspek sosial dan ekonomi keluarga, namun belum begitu signifikan.

Apabila dilihat tren perkembangannya, selama 2024–2025 jumlah KK menurut tingkat pendidikan secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan ini tampak pada kelompok KK pada jenjang SLTP ke atas dan belum tamat SD. Untuk tingkat pendidikan SD/ sederajat dan belum/ tidak sekolah, jumlah KK mengalami penurunan. Pada kelompok KK yang belum/ tidak sekolah angkanya berkurang menjadi 13.256 KK pada tahun 2025.



Gambar 4.9 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pendidikan Tahun 2024 dan 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2025 kepala keluarga laki-laki paling banyak memiliki tingkat pendidikan tamat SMA/ sederajat dengan jumlah 113.616 kepala keluarga laki-laki atau sekitar 32,41 persen. Sedangkan kepala keluarga perempuan paling banyak memiliki tingkat pendidikan tamat SD/ sederajat dengan jumlah 27.114 kepala keluarga perempuan atau sekitar 7,73 persen. Untuk jumlah KK tidak/ belum sekolah mengalami penurunan dari tahun 2024 baik laki-laki maupun perempuan, dari 5.549 menjadi 5.329 untuk KK laki-laki dan dari 8.327 menjadi 7.927 untuk KK perempuan di tahun 2025. Jika dilihat secara keseluruhan, kepala keluarga perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki di Kabupaten Bantul. Pada jenjang belum/ tidak sekolah, kepala keluarga perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

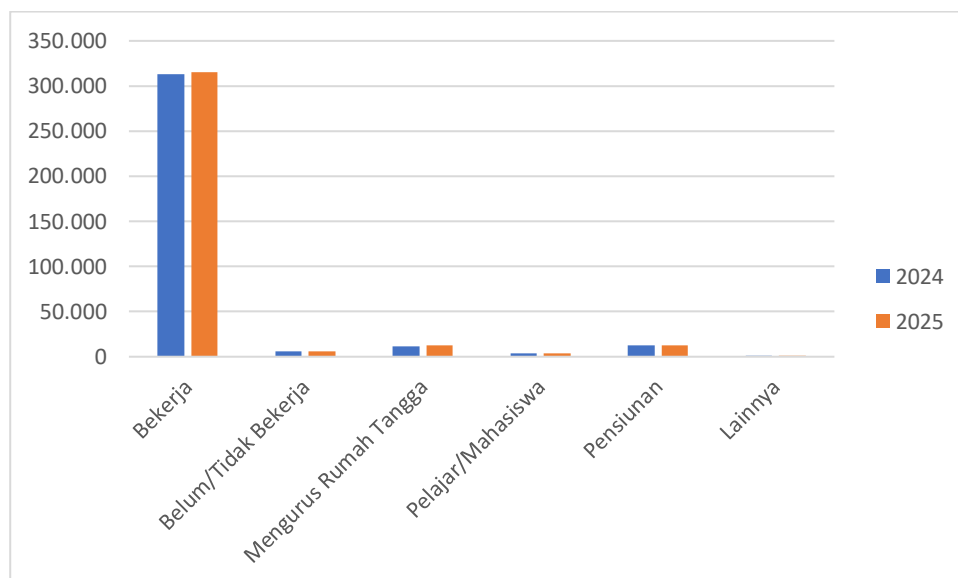
Tabel 4.23 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025

Kelompok Umur	Jumlah KK					
	2024			2025		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Belum/Tidak Sekolah	5.549	8.327	13.876	5.329	7.927	13.256
Belum Tamat SD	2.611	1.518	4.129	2.621	1.533	4.154
Tamat SD/Sederajat	64.228	26.857	91.085	62.874	27.114	89.988
Tamat SMP/Sederajat	47.536	9.758	57.294	47.720	10.102	57.822
Tamat SMA/Sederajat	111.425	16.455	127.880	113.616	17.199	130.815
DI/DII	2.371	789	3.160	2.337	802	3.139
DIII/Sarjana Muda	8.108	1.856	9.964	8.222	1.891	10.113
Diploma IV/Strata I	30.537	4.812	35.349	31.577	5.044	36.621
Strata II	3.569	481	4.050	3.718	501	4.219
Strata III	368	48	416	388	48	436
Total	276.302	70.901	347.203	278.402	72.161	350.563

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

4.3.6 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja

Informasi Karakteristik kepala keluarga menurut status pekerjaan sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Pada tahun 2025, kepala keluarga yang bekerja mengalami kenaikan dari tahun 2024 menjadi 314.998 KK atau sekitar 89,85 persen. Kepala keluarga yang berstatus sebagai pensiunan menjadi kelompok terbanyak berikutnya yaitu sekitar 3,70 persen atau 12.962 KK pada tahun 2025.



Gambar 4.10 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2024 dan 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, kepala keluarga laki-laki dan perempuan paling banyak berstatus bekerja dengan proporsi 74,89 persen untuk kepala keluarga laki-laki dan 14,96 persen untuk kepala keluarga perempuan. Pada kepala keluarga perempuan, proporsi paling banyak berikutnya adalah kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga. Jumlah kepala keluarga perempuan dengan status ini adalah 12.223 kepala keluarga atau sekitar 3,49 persen. Hal menarik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah adalah masih adanya kepala keluarga yang belum bekerja yaitu sebanyak 6.303 kepala keluarga atau sekitar 1,80 persen. Situasi ini penting mendapat penanganan secepatnya mengingat kepala keluarga adalah sosok yang berkewajiban menanggung biaya hidup keluarga. Apabila tidak ada penghasilan, maka dapat dipastikan seperti apa kondisi anggota keluarga yang rentan terhadap jerat kemiskinan.

**Tabel 4.24 Jumlah Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Status Bekerja
Tahun 2024-2025**

PEKERJAAN	JUMLAH KK					
	2024			2025		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Bekerja	261.091	52.213	313.304	262.547	52.451	314.998
Belum/Tidak Bekerja	2.758	3.507	6.265	2.816	3.487	6.303
Mengurus Rumah Tangga	29	11.511	11.540	27	12.223	12.250
Pelajar/Mahasiswa	2.210	1.036	3.246	2.364	1.071	3.435
Pensiunan	10.040	2.502	12.542	10.330	2.632	12.962
Lainnya	174	132	306	318	297	615
TOTAL	276.302	70.901	347.203	278.402	72.161	350.563

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

4.4 Kelahiran

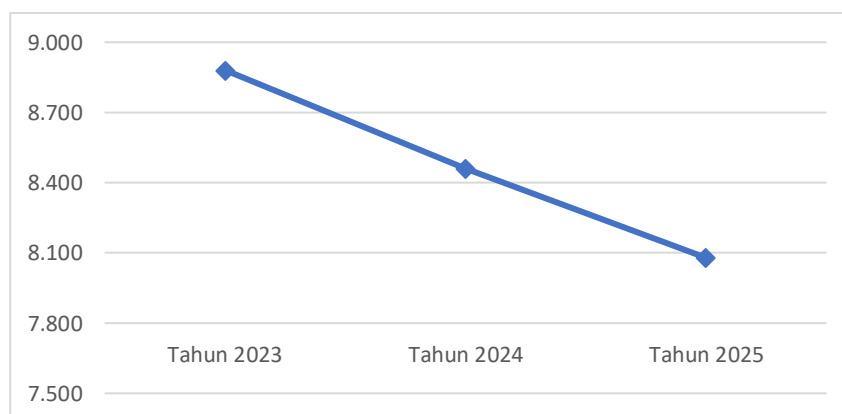
Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Istilah fertilitas merujuk pada kelahiran hidup (*live birth*), yaitu bayi yang dilahirkan dengan tanda-tanda kehidupan seperti menangis, bernapas, bergerak, dan jantung berdenyut. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, mulai dari asupan gizi hingga perawatan kesehatan ibu dan anak. Pada gilirannya, hal ini juga menuntut ketersediaan fasilitas pendidikan hingga pemenuhan kesempatan kerja di masa depan.

Tingkat kelahiran di masa lalu akan memengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini. Oleh karena itu, pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk program keluarga berencana, sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana. Data ini menjadi landasan dalam menyusun program-program pembangunan sosial, terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan pembangunan keluarga.

Indikator yang umum digunakan untuk menghitung kelahiran antara lain adalah jumlah kelahiran dan angka kelahiran kasar.

4.4.1 Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu dan di suatu wilayah. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.



Gambar 4.11 Jumlah Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, 2024, dan 2025

Jumlah kelahiran pada tahun 2023, 2024, dan 2025 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menunjukkan pola yang menurun. Pada tahun 2025, jumlah pencatatan kelahiran di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana jumlah pencatatan kelahiran pada tahun 2025 adalah 8.079 jiwa atau mengalami penurunan sebanyak 383 jiwa.

Tabel 4.25 Jumlah Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2025 Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin

Kapanewon	L		P		L+P	
	Jumlah	Presen Tase	Jumlah	Presen Tase	Jumlah	Presen Tase
Srandakan	120	2,83	113	2,94	233	2,88
Sanden	124	2,93	134	3,49	258	3,19
Kretek	137	3,23	122	3,17	259	3,21
Pundong	141	3,33	130	3,38	271	3,35
Bambanglipuro	176	4,16	152	3,95	328	4,06
Pandak	258	6,09	198	5,15	456	5,64
Pajangan	163	3,85	164	4,27	327	4,05
Bantul	266	6,28	232	6,04	498	6,16
Jetis	255	6,02	235	6,11	490	6,07
Imogiri	279	6,59	271	7,05	550	6,81
Dlingo	192	4,53	161	4,19	353	4,37
Banguntapan	516	12,18	471	12,25	987	12,22
Pleret	248	5,86	213	5,54	461	5,71
Piyungan	229	5,41	223	5,80	452	5,59
Sewon	414	9,78	388	10,09	802	9,93
Kasihan	485	11,45	415	10,80	900	11,14
Sedayu	232	5,48	222	5,78	454	5,62
Total	4.235	100	3.844	100	8.079	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Jumlah kelahiran di Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah 8.079 jiwa, di mana sekitar 52,42 persen adalah kelahiran laki-laki dan sisanya 47,58 persen adalah kelahiran perempuan. Jumlah kelahiran tertinggi di Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah di Kapanewon Banguntapan yaitu 987 jiwa atau 12,22 persen dari jumlah seluruh kelahiran di Kabupaten Bantul. Jumlah kelahiran tertinggi kedua dan ketiga terdapat di Kapanewon Kasihan yaitu 900 jiwa (11,14 persen) dan Kapanewon Sewon yaitu 802 jiwa (9,93 persen). Kapanewon dengan jumlah kelahiran paling rendah pada tahun 2025 adalah Kapanewon Srandakan yang tercatat 233 jiwa (2,88 persen). Kapanewon Sanden memiliki jumlah kelahiran terendah kedua yaitu 258 jiwa (3,19 persen).

4.4.2 Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)

Angka kelahiran kasar menunjukkan jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran fertilitas yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar. Hal ini dikarenakan pada pengukuran ini tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang tidak berisiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua).

Angka kelahiran kasar (CBR) Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah 8,22, yang bermakna dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 8 hingga 9 kelahiran hidup. Angka kelahiran kasar paling tinggi adalah Kapanewon Pleret yaitu 9,15. Hal ini berarti pada tahun 2025 di Kapanewon Pleret setiap 1.000 penduduk pertengahan tahun terjadi 9 hingga 10 kelahiran hidup. Kapanewon berikutnya yang memiliki angka kelahiran kasar tertinggi kedua adalah Kapanewon Sedayu, yaitu 9,04 kelahiran hidup per 1.000 penduduk. Adapun kapanewon dengan angka kelahiran kasar terendah di Kabupaten Bantul adalah Kapanewon Bantul yang tercatat sebesar 7,44 kelahiran hidup per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Tingginya angka kelahiran kasar tidak selalu diikuti dengan tingginya jumlah kelahiran secara absolut. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk keseluruhan turut memengaruhi perhitungan angka kelahiran kasar tersebut.

Tabel 4.26 Angka Kelahiran Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Jumlah Penduduk			Jumlah Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar
	Awal Tahun 2025	Akhir Tahun 2025	Tengah Tahun 2025		
Srandakan	31.179	31.171	31.161	233	7,48
Sanden	31.883	31.945	31.938	258	8,08
Kretek	30.866	30.941	30.908	259	8,38
Pundong	36.331	36.344	36.316	271	7,46
Bambanglipuro	42.153	42.284	42.261	328	7,76
Pandak	52.732	52.927	52.808	456	8,64
Pajangan	38.113	38.473	38.277	327	8,54
Bantul	66.705	67.116	66.903	498	7,44
Jetis	59.962	60.240	60.062	490	8,16
Imogiri	65.013	65.229	65.120	550	8,45
Dlingo	40.524	40.602	40.573	353	8,70
Banguntapan	117.875	118.712	118.222	987	8,35
Pleret	50.191	50.536	50.392	461	9,15
Piyungan	54.691	54.957	54.710	452	8,26
Sewon	103.238	103.738	103.319	802	7,76
Kasihan	108.779	109.474	109.113	900	8,25
Sedayu	50.034	50.453	50.244	454	9,04
Total	980.269	985.142	982.327	8.079	8,22

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

4.5 Kematian

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kematian atau mortalitas adalah peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang terjadi setelah fase kelahiran hidup. Kematian merupakan salah satu komponen demografi—selain fertilitas dan migrasi—yang memengaruhi jumlah, struktur, dan komposisi penduduk. Secara langsung, kematian berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Peristiwa ini dapat terjadi pada seluruh kelompok demografi, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari kelompok usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Variasi tingkat

kematian berdasarkan Karakteristik tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur umur dan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah.

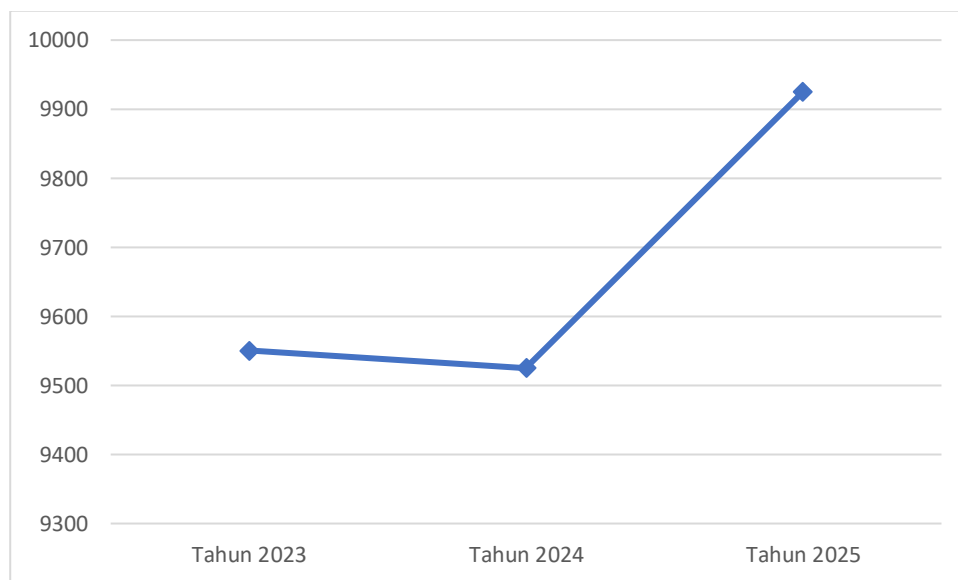
Kasus kematian dalam jumlah yang besar merupakan suatu masalah yang berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, adat istiadat, serta kesehatan lingkungan. Peristiwa kematian dapat terjadi secara mendadak akibat kecelakaan, maupun didahului oleh serangkaian kondisi kesakitan (morbidity). Saat ini, terdapat beragam jenis penyakit yang dapat memicu kematian. Kasus kematian pada penduduk usia dewasa umumnya disebabkan oleh penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan, atau gaya hidup yang berisiko tinggi. Sementara itu, kasus kematian bayi dan balita sebagian besar dipicu oleh Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit akibat infeksi kuman.

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya memengaruhi laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga menjadi barometer bagi kualitas tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Data mortalitas sangat penting dan diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan kesehatan daerah. Parameter mortalitas yang paling sering digunakan adalah indikator angka yang merepresentasikan banyaknya peristiwa kematian menurut Karakteristik tertentu dari total jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu.

4.5.1 Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Informasi mengenai jumlah kematian digunakan untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator mortalitas lainnya. Saat ini, data mengenai jumlah penduduk yang meninggal di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya tercatat dalam pangkalan data (SIAK). Masih kurangnya kesadaran

masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kematian di lingkungan keluarganya menjadi salah satu penyebab pelaporan administrasi kematian ini belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir (*up to date*).



Gambar 4.12 Jumlah Pencatatan Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 – 2025

Jumlah pencatatan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada rentang tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan dinamika. Data yang disajikan dihitung berdasarkan jumlah peristiwa kematian yang telah diterbitkan akta kematiannya. Sempat terjadi sedikit penurunan pencatatan kematian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, namun pada tahun 2025 angka pencatatan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Jumlah kematian pada tahun 2025 yang dicatatkan di Kabupaten Bantul mencapai 9.925 jiwa. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah pencatatan kematian terbanyak di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 didominasi oleh laki-laki, yakni mencapai 5.185 jiwa atau sekitar 52,24 persen. Sementara itu, jumlah pencatatan kematian perempuan tercatat sebanyak 4.740 jiwa atau sebesar 47,76 persen dari total jumlah kematian penduduk.

Tabel 4.27 Jumlah Pencatatan Kematian Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Srandakan	170	1,71	165	1,66	335	3,38
Sanden	161	1,62	175	1,76	336	3,39
Kretek	174	1,75	189	1,90	363	3,66
Pundong	220	2,22	173	1,74	393	3,96
Bambanglipuro	263	2,65	268	2,70	531	5,35
Pandak	300	3,02	261	2,63	561	5,65
Pajangan	172	1,73	186	1,87	358	3,61
Bantul	373	3,76	311	3,13	684	6,89
Jetis	332	3,35	315	3,17	647	6,52
Imogiri	325	3,27	311	3,13	636	6,41
Dlingo	176	1,77	218	2,20	394	3,97
Banguntapan	548	5,52	466	4,70	1.014	10,22
Pleret	267	2,69	223	2,25	490	4,94
Piyungan	263	2,65	237	2,39	500	5,04
Sewon	594	5,98	485	4,89	1.079	10,87
Kasihan	551	5,55	489	4,93	1.040	10,48
Sedayu	296	2,98	268	2,70	564	5,68
Total	5.185	52,24	4.740	47,76	9.925	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Apabila melihat cakupan wilayahnya, jumlah pencatatan kematian paling tinggi terdapat di Kapanewon Sewon, yaitu 1.079 jiwa atau sekitar 10,87 persen dari total kematian yang tercatat di Kabupaten Bantul. Selanjutnya, kapanewon dengan jumlah pencatatan kematian tertinggi berikutnya adalah Kasihan (1.040 jiwa atau 10,48 persen) dan Banguntapan (1.014 jiwa atau 10,22 persen). Sementara itu, kapanewon dengan jumlah pencatatan kematian paling rendah pada tahun 2025 adalah Srandakan, yakni sebanyak 335 jiwa (3,38 persen). Tinggi rendahnya jumlah pencatatan kematian ini belum dapat serta-merta dijadikan parameter mutlak untuk menilai baik buruknya derajat kesehatan di Kabupaten Bantul, karena penyebab spesifik kematian tidak teridentifikasi dengan rinci akibat keterbatasan data.

Ke depan, faktor penyebab kematian perlu didata secara lebih komprehensif untuk memetakan situasi kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul secara akurat. Apabila tren kematian di suatu wilayah terindikasi banyak disebabkan oleh penyakit tertentu atau buruknya kesehatan lingkungan, pemerintah daerah—terutama Dinas Kesehatan—dapat segera mengambil langkah tanggap melalui program intervensi spesifik yang tepat sasaran, sehingga angka kematian akibat faktor yang dapat dicegah dapat diminimalkan.

4.5.2 Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)

Angka Kematian Kasar (CDR) merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian selama setahun untuk setiap 1.000 penduduk. Parameter ini dikatakan kasar karena jumlah pembaginya adalah total penduduk seluruhnya pada pertengahan tahun. Pada kenyataannya, tingkat mortalitas berbeda-beda menurut umur dan jenis kelamin. Angka kematian kasar Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah 10,10. Hal ini bermakna bahwa pada tahun 2025 di Kabupaten Bantul terdapat 10 hingga 11 orang yang meninggal dari setiap 1.000 penduduk.

Berdasarkan cakupan wilayah, diketahui pada tahun 2025 angka kematian kasar tertinggi terjadi di Kapanewon Bambanglipuro dengan angka 12,56 atau sekitar 12 hingga 13 kematian setiap 1.000 penduduk di wilayah tersebut. Angka kematian tertinggi berikutnya adalah 11,74 atau terdapat 11 hingga 12 kematian per 1.000 penduduk yang terjadi di Kapanewon Kretek. Kapanewon Bambanglipuro dan Kretek sejatinya tidak termasuk kapanewon dengan jumlah kematian absolut paling banyak. Namun, karena populasi penduduknya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan proporsi jumlah kematian yang terjadi, maka angka kematian kasar di wilayah ini menjadi tinggi. Perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul sangat diperlukan untuk menindaklanjuti temuan ini. Angka kematian kasar yang tinggi mengindikasikan adanya permasalahan spesifik yang memicu timbulnya penyebab-penyebab kematian di wilayah tersebut. Oleh karena itu, temuan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk

menelusuri akar penyebab kematian di masing-masing wilayah secara lebih mendalam.

Tabel 4.28 Angka Pencatatan Kematian Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Jumlah Penduduk			Jumlah Pencatatan Kematian	Angka Kematian Kasar
	Awal Tahun	Akhir Tahun	Tengah Tahun		
Srandakan	31.179	31.171	31.161	335	10,75
Sanden	31.883	31.945	31.938	336	10,52
Kretek	30.866	30.941	30.908	363	11,74
Pundong	36.331	36.344	36.316	393	10,82
Bambanglipuro	42.153	42.284	42.261	531	12,56
Pandak	52.732	52.927	52.808	561	10,62
Pajangan	38.113	38.473	38.277	358	9,35
Bantul	66.705	67.116	66.903	684	10,22
Jetis	59.962	60.240	60.062	647	10,77
Imogiri	65.013	65.229	65.120	636	9,77
Dlingo	40.524	40.602	40.573	394	9,71
Banguntapan	117.875	118.712	118.222	1.014	8,58
Pleret	50.191	50.536	50.392	490	9,72
Piyungan	54.691	54.957	54.710	500	9,14
Sewon	103.238	103.738	103.319	1.079	10,44
Kasihan	108.779	109.474	109.113	1.040	9,53
Sedayu	50.034	50.453	50.244	564	11,23
Total	980.269	985.142	982.327	9.925	10,10

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

5. KUALITAS PENDUDUK

Penduduk dari segi kualitas sangat menentukan kemajuan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik tidak akan menjadi kekuatan, namun justru akan menjadi beban bagi wilayah tersebut. Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan situasi mobilitas. Pada bab ini, akan dibahas secara lebih mendalam mengenai penduduk Kabupaten Bantul yang ditinjau dari sisi kualitasnya. Pembahasan pada bab ini mencakup lima aspek utama, antara lain: 1.) kesehatan, 2.) pendidikan, 3.) ekonomi, 4.) sosial, dan 5.) mobilitas.

5.1 Kesehatan

Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas penduduk dari aspek kesehatan adalah tingkat kelahiran dan kematian. Kedua indikator ini secara langsung memengaruhi perubahan jumlah serta struktur penduduk di suatu wilayah.

5.1.1 Kelahiran

Kelahiran merupakan faktor penyebab terjadinya pertambahan penduduk secara alami. Kondisi kesehatan dari sisi kelahiran dapat diukur melalui Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR), Angka Kelahiran Total (TFR), dan Rasio Anak dan Perempuan (CWR).

5.1.1.1 Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)

Angka kelahiran menurut umur (*Age-Specific Fertility Rate/ASFR*) menunjukkan jumlah kelahiran menurut kelompok umur, mulai dari usia 15–19 tahun hingga 45–49 tahun, per 1.000 penduduk perempuan per tahun.

5.1.1.2 Angka Kelahiran Total (TFR)

Indikator lain yang menunjukkan tingkat kelahiran di suatu wilayah adalah *Total Fertility Rate* atau angka kelahiran total. Angka fertilitas total (TFR) menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga ia mengakhiri masa reproduksinya. Angka TFR ini dihitung dengan menjumlahkan ASFR kelompok usia 15–19 tahun hingga 45–49 tahun, yang kemudian dikalikan lima. TFR merupakan ukuran terbaik untuk mengidentifikasi pola kelahiran di suatu wilayah dibandingkan dengan parameter lainnya.

5.1.1.3 Rasio anak dan perempuan (CWR)

Rasio anak dan perempuan (*Child-Woman Ratio/CWR*) adalah rasio antara jumlah anak di bawah usia lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun.

5.1.2 (Mortalitas)

Kematian merupakan faktor penyebab terjadinya pengurangan jumlah penduduk secara alami. Profil kematian penduduk di suatu wilayah dapat menjadi indikator berhasil tidaknya pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. Berdasarkan Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, paparan terkait kematian dalam pembahasan kualitas penduduk meliputi angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian *post-neonatal*, angka kematian anak, angka kematian balita, dan angka kematian ibu. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan bayi dan ibu.

Indikator berikutnya yang menunjukkan tinggi rendahnya derajat kesehatan di suatu wilayah sebagai parameter kematian adalah angka kematian ibu. Pelayanan kesehatan yang terkait dengan pelayanan ibu hamil, proses melahirkan, dan pascapersalinan perlu terus ditingkatkan untuk menekan angka kejadian pada tahun-tahun mendatang. Selain peran aktif perempuan sebagai

subjek sekaligus objek dalam situasi ini, peran laki-laki sebagai kepala keluarga sekaligus suami/pasangan dituntut untuk aktif memberikan perawatan, penjagaan, dan perlindungan bagi istri, baik saat hamil, melahirkan, maupun masa nifas.

Program Suami SIAGA dan Kalurahan SIAGA perlu digalakkan dengan lebih optimal di Kabupaten Bantul. Selain peran pasangan, peran tenaga kesehatan juga krusial untuk terus ditingkatkan guna menekan angka kematian ibu yang masih mengalami tren peningkatan. Peranan tenaga kesehatan dalam hal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait informasi kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan, dan pascamelahirkan, maupun dalam bentuk tindakan proaktif seperti kunjungan langsung kepada ibu hamil di tiap kalurahan.

5.2 Pendidikan

Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan dapat digambarkan melalui penjabaran Misi 5K. Kelima misi tersebut mencakup ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan, peningkatan mutu pendidikan, perwujudan kesetaraan, serta kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan. Salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan program tersebut—khususnya pada misi kelima terkait kepastian dan pemerataan layanan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota—adalah melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Oleh karena itu, tinjauan mengenai kualitas penduduk Kabupaten Bantul dari aspek pendidikan pada sub-bab ini akan difokuskan menggunakan kedua indikator partisipasi sekolah tersebut.

5.2.1 Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsep Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, perhitungan APK turut memasukkan cakupan Pendidikan Nonformal (Kejar Paket A, B, dan C).

Tingginya nilai APK menunjukkan besarnya tingkat partisipasi sekolah di suatu wilayah tanpa memperhatikan ketepatan usia siswa pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau bahkan melebihi 100 persen, hal ini mengindikasikan adanya siswa yang belum mencukupi umur atau justru melebihi umur wajar pada jenjang tersebut. Kondisi ini juga dapat merepresentasikan bahwa daya tampung wilayah bersangkutan mampu memfasilitasi penduduk usia sekolah melebihi target sasarannya.

5.2.2 Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang tepat atau sesuai dengan usianya. Sama halnya dengan perhitungan APK, sejak tahun 2007, cakupan APM Pendidikan Nonformal (Kejar Paket A, B, dan C) juga turut diperhitungkan.

Indikator APM ini secara spesifik menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan secara tepat pada jenjang yang semestinya. Apabila nilai APM mencapai angka 100, hal ini bermakna bahwa seluruh anak usia sekolah di wilayah tersebut telah terfasilitasi dan dapat bersekolah secara tepat waktu sesuai jenjang umurnya.

5.3 Ekonomi

Kualitas penduduk dari aspek ekonomi dikaji dari beberapa indikator, di antaranya proporsi dan jumlah tenaga kerja, penduduk yang bekerja,

penganggur, angka partisipasi angkatan kerja, dan penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan.

5.3.1 Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)

5.3.1.1 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Jumlah dan proporsi tenaga kerja (penduduk usia 15–64 tahun) di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 tercatat sebanyak 685.495 orang atau 69,58 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Jumlah tersebut terdiri dari 49,94 persen laki-laki dan selebihnya yaitu 50,06 persen perempuan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bantul ini menunjukkan tren peningkatan. Proporsi tenaga kerja secara umum mengalami sedikit kenaikan, dari 69,57 persen pada tahun 2024 menjadi 69,58 persen pada tahun 2025.

Tabel 5.1 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun 2025			Persentase Tenaga Kerja		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Srandakan	15.506	15.665	31.171	10.605	10.499	21.104	68,39	67,02	67,70
Sanden	15.773	16.172	31.945	10.808	10.836	21.644	68,52	67,00	67,75
Kretek	15.234	15.707	30.941	10.550	10.446	20.996	69,25	66,51	67,86
Pundong	18.027	18.317	36.344	12.372	12.380	24.752	68,63	67,59	68,10
Bambanglipuro	20.931	21.353	42.284	14.614	14.627	29.241	69,82	68,50	69,15
Pandak	26.600	26.327	52.927	18.491	18.207	36.698	69,52	69,16	69,34
Pajangan	19.278	19.195	38.473	13.411	13.239	26.650	69,57	68,97	69,27
Bantul	33.300	33.816	67.116	23.225	23.750	46.975	69,74	70,23	69,99
Jetis	30.089	30.151	60.240	20.896	20.996	41.892	69,45	69,64	69,54
Imogiri	32.378	32.851	65.229	22.135	22.132	44.267	68,36	67,37	67,86
Dlingo	20.189	20.413	40.602	13.825	13.736	27.561	68,48	67,29	67,88
Banguntapan	58.918	59.794	118.712	41.599	42.465	84.064	70,60	71,02	70,81
Pleret	25.442	25.094	50.536	17.831	17.584	35.415	70,08	70,07	70,08
Piyungan	27.354	27.603	54.957	19.165	19.172	38.337	70,06	69,46	69,76
Sewon	51.852	51.886	103.738	36.517	36.726	73.243	70,43	70,78	70,60
Kasihan	54.604	54.870	109.474	38.668	38.830	77.498	70,82	70,77	70,79
Sedayu	25.102	25.351	50.453	17.655	17.503	35.158	70,33	69,04	69,68
Total	490.577	494.565	985.142	342.367	343.128	685.495	69,79	69,38	69,58

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Menurut cakupan wilayah, kapanewon yang memiliki persentase tenaga kerja paling tinggi pada tahun 2025 adalah Kapanewon Banguntapan, yaitu 70,81 persen (84.064 orang). Jumlah dan persentase tenaga kerja paling tinggi berikutnya terdapat di Kapanewon Kasihan, yaitu 70,79 persen (77.498 orang). Adapun kapanewon dengan persentase tenaga kerja paling rendah adalah Kapanewon Srandakan yaitu sebesar 67,70 persen. Secara absolut, Kapanewon Kretek memiliki jumlah tenaga kerja paling rendah dibanding kapanewon lain di Kabupaten Bantul pada tahun 2025, yaitu sebanyak 20.996 orang atau dengan persentase 67,86 persen.

5.3.1.2 Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja)

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah 685.495 orang atau sekitar 69,58 persen dari jumlah penduduk Bantul keseluruhan. Pada tahun 2025, perbandingan proporsi angkatan kerja laki-laki dan perempuan adalah 49,94 persen untuk angkatan kerja laki-laki dan 50,06 persen untuk angkatan kerja perempuan.

Apabila dilihat menurut wilayah, jumlah angkatan kerja paling banyak pada tahun 2025 terdapat di Kapanewon Banguntapan yaitu 84.064 orang (70,81 persen).

Tabel 5.2 Jumlah Angkatan Kerja (Penduduk yang Bekerja dan Tidak Bekerja) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025

KAPANEWON	JUMLAH PENDUDUK			ANGKATAN KERJA			BEKERJA			TIDAK BEKERJA		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
SRANDAKAN	15.506	15.665	31.171	10.605	10.499	21.104	10.223	10.130	20.353	382	369	751
SANDEN	15.773	16.172	31.945	10.808	10.836	21.644	10.471	10.521	20.992	337	315	652
KRETEK	15.234	15.707	30.941	10.550	10.446	20.996	10.252	10.195	20.447	298	251	549
PUNDONG	18.027	18.317	36.344	12.372	12.380	24.752	11.965	12.031	23.996	407	349	756
BAMBANGLIPURO	20.931	21.353	42.284	14.614	14.627	29.241	13.810	13.899	27.709	804	728	1.532
PANDAK	26.600	26.327	52.927	18.491	18.207	36.698	17.661	17.422	35.083	830	785	1.615
PAJANGAN	19.278	19.195	38.473	13.411	13.239	26.650	13.083	12.929	26.012	328	310	638
BANTUL	33.300	33.816	67.116	23.225	23.750	46.975	22.082	22.839	44.921	1143	911	2.054
JETIS	30.089	30.151	60.240	20.896	20.996	41.892	20.086	19.808	39.894	810	1.188	1.998
IMOGIRI	32.378	32.851	65.229	22.135	22.132	44.267	20.541	20.235	40.776	1.594	1.897	3.491
DLINGO	20.189	20.413	40.602	13.825	13.736	27.561	13.581	13.496	27.077	244	240	484
BANGUNTAPAN	58.918	59.794	118.712	41.599	42.465	84.064	40.223	41.176	81.399	1376	1289	2.665
PLERET	25.442	25.094	50.536	17.831	17.584	35.415	17.228	17.035	34.263	603	549	1.152
PIYUNGAN	27.354	27.603	54.957	19.165	19.172	38.337	18.524	18.614	37.138	641	558	1.199
SEWON	51.852	51.886	103.738	36.517	36.726	73.243	35.144	35.274	70.418	1373	1.452	2.825
KASIHAN	54.604	54.870	109.474	38.668	38.830	77.498	37.946	37.987	75.933	722	843	1.565
SEDAYU	25.102	25.351	50.453	17.655	17.503	35.158	17.145	17.058	34.203	510	445	955
TOTAL	490.577	494.565	985.142	342.367	343.128	685.495	329.965	330.649	660.614	12.402	12.479	24.881

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah 660.614 orang atau sekitar 96,37 persen dari jumlah angkatan kerja di Bantul. Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 659.358 orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2025 ini terdiri dari 49,95 persen laki-laki dan 50,05 persen perempuan.

5.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Apabila dilihat berdasarkan jenis pekerjaannya, pada tahun 2025, penduduk Bantul paling banyak adalah kelompok Belum/Tidak Bekerja yaitu sebesar 186.218 jiwa atau 18,90 persen dari total penduduk. Tertinggi kedua adalah kelompok Pelajar/Mahasiswa yaitu sebesar 177.864 jiwa atau 18,05 persen dari total penduduk. Jenis profesi tertinggi ketiga adalah Buruh Harian Lepas yaitu sebesar 151.428 jiwa atau 15,37 persen dari total penduduk.

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
		Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase
1	Belum/Tidak Bekerja	94.410	19,24	91.808	18,56	186.218	18,90
2	Mengurus Rumah Tangga	36	0,01	77.886	15,75	77.922	7,91
3	Pelajar/Mahasiswa	92.094	18,77	85.770	17,34	177.864	18,05
4	Pensiunan	10.373	2,11	5.445	1,10	15.818	1,61
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9.035	1,84	9.355	1,89	18.390	1,87
6	Tentara Nasional Indonesia	2.902	0,59	115	0,02	3.017	0,31
7	Kepolisian RI (POLRI)	3.378	0,69	258	0,05	3.636	0,37
8	Perdagangan	836	0,17	1.183	0,24	2.019	0,20
9	Petani/Pekebun	8.479	1,73	9.521	1,93	18.000	1,83
10	Peternak	151	0,03	26	0,01	177	0,02
11	Nelayan/Perikanan	81	0,02	6	0,001	87	0,01
12	Industri	41	0,01	23	0,005	64	0,01
13	Konstruksi	67	0,01	0	0	67	0,01
14	Transportasi	148	0,03	5	0,001	153	0,02

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
		Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase
15	Karyawan Swasta	61.968	12,63	46.313	9,36	108.281	10,99
16	Karyawan Bumh	1.381	0,28	566	0,11	1.947	0,20
17	Karyawan Bumh	178	0,04	147	0,03	325	0,03
18	Karyawan Honorer	1.220	0,25	1.265	0,26	2.485	0,25
19	Buruh Harian Lepas	91.652	18,68	59.776	12,09	151.428	15,37
20	Buruh Tani/Perkebunan	38.887	7,93	38.282	7,74	77.169	7,83
21	Buruh Nelayan/Perikanan	80	0,02	32	0,01	112	0,01
22	Buruh Peternakan	72	0,01	17	0,003	89	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	7	0,001	481	0,10	488	0,05
24	Tukang Cukur	60	0,01	1	0,0002	61	0,01
25	Tukang Listrik	70	0,01	1	0,0002	71	0,01
26	Tukang Batu	979	0,20	2	0,0004	981	0,10
27	Tukang Kayu	746	0,15	1	0,0002	747	0,08
28	Tukang Sol Sepatu	22	0,004	1	0,0002	23	0,002
29	Tukang Las/Pandai Besi	127	0,03	0	0	127	0,01
30	Tukang Jahit	183	0,04	882	0,18	1.065	0,11
31	Tukang Gigi	7	0,001	1	0,0002	8	0,001
32	Penata Rias	9	0,002	96	0,02	105	0,01
33	Penata Busana	1	0,0002	18	0,004	19	0,002
34	Penata Rambut	10	0,002	36	0,01	46	0,005
35	Mekanik	457	0,09	1	0,0002	458	0,05
36	Seniman	596	0,12	136	0,03	732	0,07
37	Tabib	14	0,003	0	0	14	0,001
38	Paraji	14	0,003	2	0	16	0,002
39	Perancang Busana	1	0,0002	10	0,002	11	0,001
40	Penterjemah	15	0,003	11	0,002	26	0,003
41	Imam Masjid	11	0,002	0	0,00	11	0,001
42	Pendeta	44	0,01	8	0,002	52	0,01
43	Pastor	19	0,004	0	0	19	0,002
44	Wartawan	73	0,01	15	0,003	88	0,01
45	Ustadz/Mubaligh	59	0,01	9	0,002	68	0,01
46	Juru Masak	29	0,01	26	0,01	55	0,01
47	Promotor Acara	2	0,0004	0	0,00	2	0,0002
48	Anggota DPR RI	0	0	0	0	0	0
49	Anggota DPD RI	0	0	0	0	0	0
50	Anggota BPK	1	0,0002	0	0	1	0,0001

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
		Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase
51	Presiden	0	0	0	0	0	0
52	Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	0	0
54	Anggota Kabinet Kementrian	0	0	0	0	0	0
55	Duta Besar	0	0	0	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0	0	0
58	Bupati	0	0	0	0	0	0
59	Wakil Bupati	1	0,0002	0	0	1	0,0001
60	Walikota	0	0	0	0	0	0
61	Wakil Walikota	0	0	0	0	0	0
62	Anggota DPRD Prop.	3	0,001	1	0,0002	4	0,0004
63	Anggota DPRD Kab./Kota	20	0,004	2	0,0004	22	0,002
64	Dosen	938	0,19	809	0,16	1.747	0,18
65	Guru	2.109	0,43	5.899	1,19	8.008	0,81
66	Pilot	1	0,0002	0	0	1	0,0001
67	Pengacara	107	0,02	21	0,004	128	0,01
68	Notaris	18	0,004	29	0,01	47	0,005
69	Arsitek	55	0,01	8	0,002	63	0,01
70	Akuntan	7	0,001	10	0,002	17	0,002
71	Konsultan	48	0,01	20	0,004	68	0,01
72	Dokter	281	0,06	578	0,12	859	0,09
73	Bidan	0	0,00	512	0,10	512	0,05
74	Perawat	260	0,05	1194	0,24	1.454	0,15
75	Apoteker	30	0,01	219	0,04	249	0,03
76	Psikiater/Psikolog	7	0,001	22	0,004	29	0,003
77	Penyiar Televisi	0	0	0	0	0	0
78	Penyiar Radio	3	0,001	5	0,001	8	0,001
79	Pelaut	116	0,02	4	0,001	120	0,01
80	Peneliti	24	0,005	15	0,003	39	0,004
81	Sopir	1.169	0,24	0	0	1.169	0,12
82	Pialang	2	0,0004	0	0	2	0,0002
83	Paranormal	3	0,001	1	0,0002	4	0,0004
84	Pedagang	2.436	0,50	4.049	0,82	6.485	0,66
85	Perangkat Desa	1.192	0,24	212	0,04	1.404	0,14
86	Kepala Desa	43	0,01	2	0,0004	45	0,005

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
		Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase	Jumlah	Presen tase
87	Biarawan/Biarawati	0	0	28	0,01	28	0,003
88	Wiraswasta	58.990	12,02	48.596	9,83	107.586	10,92
89	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	1.131	0,23	1.798	0,36	2.929	0,30
90	Artis	0	0	0	0	0	0
91	Atlit	0	0	0	0	0	0
92	Cheff	1	0,0002	0	0	1	0,0001
93	Manajer	0	0	0	0	0	0,00
94	Tenaga Tata Usaha	1	0,0002	2	0,0004	3	0,0003
95	Operator	0	0	1	0,0002	1	0,0001
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	2	0,0004	2	0,0004	4	0,0004
97	Teknisi	0	0	1	0,0002	1	0,0001
98	Asisten Ahli	2	0,0004	1	0,0002	3	0,0003
99	Pekerjaan Lainnya	552	0,11	987	0,20	1.539	0,16
Jumlah		490.577	100	494.565	100	985.142	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

5.4 Sosial

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Akibatnya, mereka tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan (disabilitas), ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau tidak menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat terdapat 26 jenis PMKS, di antaranya meliputi: anak balita telantar, anak telantar, anak

berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lansia telantar, penyandang disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan pemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban perdagangan orang (*trafficking*), korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni, dan komunitas adat terpencil.

5.5 Mobilitas Penduduk

Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 menyebutkan bahwa profil kependudukan harus menyertakan pembahasan mengenai mobilitas penduduk. Rincian pembahasan tersebut meliputi:

5.5.1 Mobilitas Permanen, yang terdiri dari:

1. Migrasi masuk
2. Migrasi keluar
3. Migrasi neto
4. Migrasi bruto

5.5.2 Mobilitas Nonpermanen

5.5.3 Urbanisasi, yang terdiri dari:

1. Persentase penduduk kota
2. Rasio kota dan kalurahan

Pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bantul ini menampilkan data migrasi masuk dan migrasi keluar Tahun 2025. Data migrasi masuk dan keluar tersebut adalah jumlah penduduk yang melakukan migrasi antar-kabupaten dan antar-provinsi. Tabel 5.4 menunjukkan bahwa jumlah migrasi masuk menuju Kabupaten Bantul lebih banyak dibandingkan jumlah migrasi keluar. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 10.903 orang melakukan

migrasi masuk ke Kabupaten Bantul. Sementara itu, jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar Kabupaten Bantul berjumlah 7.967 orang.

Tabel 5.4 Jumlah Penduduk yang Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar
Srandakan	228	224
Sanden	253	200
Kretek	252	184
Pundong	265	266
Bambanglipuro	402	279
Pandak	374	282
Pajangan	414	194
Bantul	783	526
Jetis	589	378
Imogiri	392	315
Dlingo	242	267
Banguntapan	1.976	1.514
Pleret	486	282
Piyungan	671	569
Sewon	1.337	936
Kasihan	1.576	1.137
Sedayu	663	414
Total	10.903	7.967

Sumber : Data Pelayanan mutasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025

Apabila dilihat menurut wilayahnya, jumlah migrasi masuk paling banyak terdapat di Kapanewon Banguntapan yaitu sebanyak 1.976 orang. Jumlah migrasi masuk terbanyak berikutnya adalah 1.576 orang menuju Kapanewon Kasihan. Sementara itu, kapanewon dengan jumlah migrasi masuk paling sedikit adalah Kapanewon Srandakan, di mana hanya terdapat 228 orang yang bermigrasi masuk ke wilayah ini. Wilayah dengan jumlah migrasi keluar paling banyak adalah Kapanewon Banguntapan dengan jumlah 1.514 orang. Kapanewon Kretek merupakan kapanewon dengan jumlah migrasi keluar paling rendah dibanding kapanewon lain. Pada tahun 2025 di Kapanewon Kretek, tercatat hanya 184 orang yang melakukan migrasi keluar dari wilayah ini.

6. KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pada bab ini akan dibahas kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bantul antara lain: 1) kepemilikan kartu keluarga, 2) kepemilikan KTP, dan 3) kepemilikan akta yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian.

6.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, jumlah keluarga yang berada di Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah sebesar 350.563. Dari jumlah kepala keluarga tersebut, persentase kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Bantul sebesar 100 persen. Artinya, setiap kepala keluarga pada tiap-tiap kapanewon di Kabupaten Bantul telah memiliki kartu keluarga. Persentase kepemilikan kartu keluarga ini berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang secara sah memiliki Kartu Keluarga.

Kesadaran masyarakat untuk mengurus kartu keluarga sangat tinggi karena merupakan dokumen yang sangat penting bagi identitas keluarga serta digunakan untuk syarat kepengurusan kegiatan administratif lain. Dibandingkan tahun 2024, jumlah kartu keluarga yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya kenaikan. Jika pada tahun 2024 terdapat sebesar 347.203 KK, maka pada tahun 2025 jumlahnya mengalami kenaikan sebanyak 3.360 KK.

Tabel 6.1 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul 2025

Kapanewon	Kartu Keluarga (KK)		
	Jumlah KK	Kepemilikan KK	Persentase
Srandakan	11.414	11.414	100
Sanden	11.907	11.907	100
Kretek	11.534	11.534	100
Pundong	13.164	13.164	100
Bambanglipuro	15.684	15.684	100
Pandak	19.263	19.263	100
Pajangan	13.278	13.278	100
Bantul	24.156	24.156	100
Jetis	21.811	21.811	100
Imogiri	23.380	23.380	100
Dlingo	14.478	14.478	100
Banguntapan	40.755	40.755	100
Pleret	17.369	17.369	100
Piyungan	19.172	19.172	100
Sewon	36.771	36.771	100
Kasihan	38.582	38.582	100
Sedayu	17.845	17.845	100
Total	350.563	350.563	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Berdasarkan kepemilikan kartu keluarga per kapanewon, jumlah kepemilikan kartu keluarga terbesar berada di Kapanewon Banguntapan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 40.755 KK. Sedangkan kapanewon yang memiliki kepemilikan kartu keluarga terendah adalah Kapanewon Srandakan dengan jumlah kepala keluarga sebesar 11.414 KK.

6.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas diri kewarganegaraan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang tinggal di Indonesia. Pada sub-bab ini akan dibahas persentase kepemilikan dokumen KTP di Kabupaten Bantul. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk secara sah.

Berdasarkan Tabel 6.2, diketahui bahwa penduduk yang telah terdaftar sebagai wajib KTP pada tahun 2025 adalah sebesar 766.929 jiwa. Dari jumlah tersebut, persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Bantul mencapai 99,59 persen. Artinya, penduduk yang telah memiliki KTP-el adalah sebanyak 763.758 jiwa.

Tabel 6.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El)		
	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP-el	Persentase
Srandakan	24.748	24.688	99,76
Sanden	25.522	25.475	99,82
Kretek	24.711	24.663	99,81
Pundong	28.481	28.422	99,79
Bambanglipuro	33.536	33.476	99,82
Pandak	41.821	41.750	99,83
Pajangan	29.774	29.674	99,66
Bantul	52.364	52.279	99,84
Jetis	46.841	46.582	99,45
Imogiri	50.625	50.255	99,27
Dlingo	32.096	31.889	99,36
Banguntapan	90.968	90.499	99,48
Pleret	38.285	37.937	99,09
Piyungan	42.248	41.989	99,39
Sewon	80.625	80.326	99,63
Kasihan	84.894	84.692	99,76
Sedayu	39.390	39.162	99,42
Total	766.929	763.758	99,59

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

6.3 Kepemilikan Akta

Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai tingkat kepemilikan dokumen akta pencatatan sipil. Pembahasan kepemilikan dokumen akta ini terbagi menjadi empat jenis, yang meliputi: akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian.

6.3.1 Akta Kelahiran

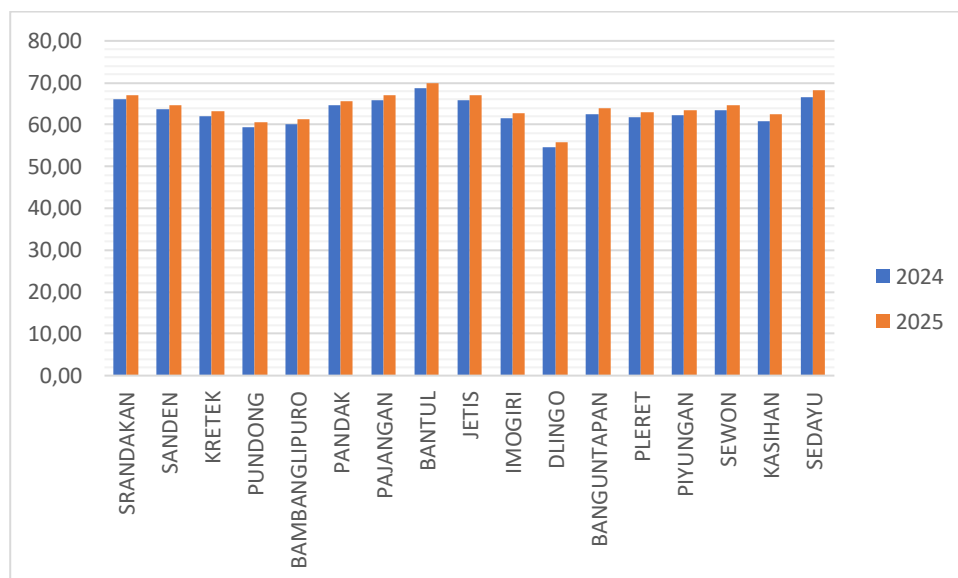
Akta kelahiran merupakan identitas awal sekaligus bukti legal yang menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari warga Negara Indonesia. Kepemilikan akta kelahiran dihitung dari jumlah bayi lahir dan sudah dicarikan akta kelahiran dan jumlah kelahiran dari wilayah tertentu. Berdasarkan Tabel 6.3, kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kabupaten Bantul sebesar 62,92 persen. Artinya dari 980.269 sebesar 616.757 sudah memiliki akta kelahiran. Berdasarkan kapanewon yang ada, Kapanewon Bantul (68,77 persen) dan Kapanewon Sedayu (66,54 persen) merupakan kapanewon dengan persentase kepemilikan akta tertinggi di Kabupaten Bantul. Sedangkan Kapanewon Dlingo (54,54 persen) dan Kapanewon Pundong (59,27 persen) merupakan kapanewon yang memiliki persentase kepemilikan akta terendah.

Tabel 6.3 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul 2025

Kapanewon	Kepemilikan Akta Kelahiran		
	Jumlah Penduduk	Memiliki Akta Kelahiran	Persentase
Srandakan	31.171	20.878	66,98
Sanden	31.945	20.682	64,74
Kretek	30.941	19.522	63,09
Pundong	36.344	21.969	60,45
Bambanglipuro	42.284	25.910	61,28
Pandak	52.927	34.761	65,68
Pajangan	38.473	25.798	67,05
Bantul	67.116	46.907	69,89
Jetis	60.240	40.351	66,98
Imogiri	65.229	40.951	62,78
Dlingo	40.602	22.649	55,78
Banguntapan	118.712	75.775	63,83
Pleret	50.536	31.852	63,03
Piyungan	54.957	34.852	63,42
Sewon	103.738	67.073	64,66
Kasihan	109.474	68.268	62,36
Sedayu	50.453	34.403	68,19
Total	985.142	632.601	64,21

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Capaian ini menunjukkan adanya tren peningkatan jika dibandingkan dengan persentase kepemilikan pada tahun sebelumnya. Kenaikan persentase kepemilikan akta kelahiran ini dialami secara merata oleh seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Kapanewon-kapanewon seperti Sedayu, Kasihan, Pleret, dan Banguntapan turut mencatatkan tren positif peningkatan kepemilikan yang cukup baik. Visualisasi tren kenaikan persentase kepemilikan akta kelahiran dari tahun 2024 ke 2025 dapat dilihat secara lebih rinci pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Grafik Perubahan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kepemilikan akta pada tingkat anak (usia 0-17 tahun) di Kabupaten Bantul tergolong sangat tinggi. Berdasarkan Tabel 6.4, diketahui bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak mencapai 99,98 persen. Terjadinya peningkatan capaian kepemilikan akta dari tahun 2024 ke 2025 ini dikarenakan gencarnya kegiatan "susur akta", di mana penduduk usia anak yang belum memiliki akta didatangi langsung ke rumah dan difasilitasi kepengurusannya. Pada tahun 2025, tercatat ada sembilan kapanewon yang berhasil mencapai tingkat kepemilikan akta kelahiran anak secara paripurna (100 persen), yaitu Kapanewon Srandakan, Kretek, Pundong, Pandak, Pajangan, Bantul, Imogiri, Dlingo, dan Sewon.

Kepemilikan akta kelahiran anak terendah saat ini berada di Kapanewon Kasihan, yakni sebesar 99,95 persen. Meskipun angkanya sudah sangat tinggi, hal ini tetap perlu mendapatkan perhatian karena kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan wujud legal identitas yang dimaksud adalah akta kelahiran.

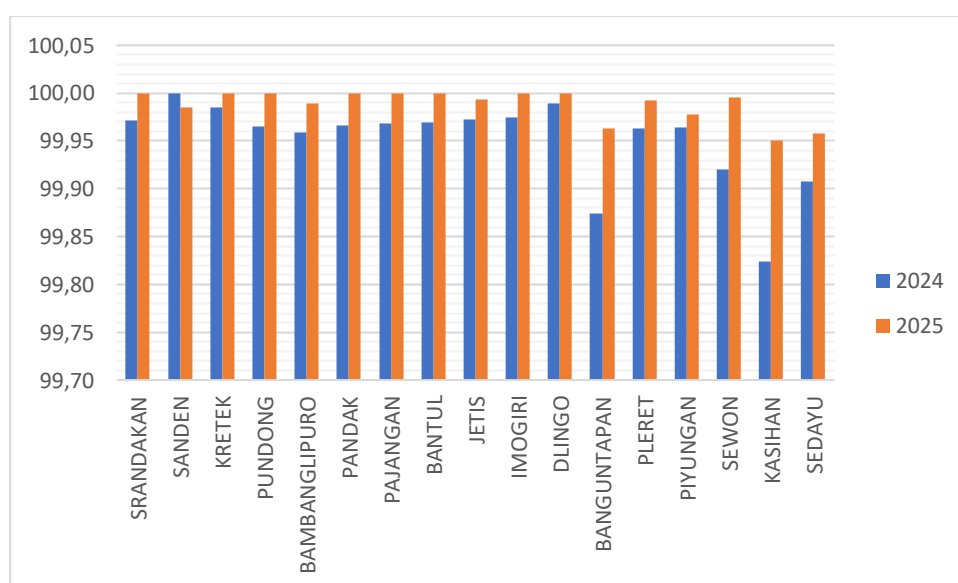
Tabel 6.4 Kepemilikan Akta Lahir Anak (0-17 tahun) di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Kepemilikan Akta Kelahiran		
	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun	Memiliki Akta Kelahiran	Persentase
Srandakan	6.856	6.856	100,00
Sanden	6.909	6.908	99,99
Kretek	6.677	6.677	100,00
Pundong	8.413	8.413	100,00
Bambanglipuro	9.408	9.407	99,99
Pandak	11.863	11.863	100,00
Pajangan	9.297	9.297	100,00
Bantul	15.858	15.858	100,00
Jetis	14.301	14.300	99,99
Imogiri	15.661	15.661	100,00
Dlingo	9.147	9.147	100,00
Banguntapan	29.697	29.686	99,96
Pleret	13.202	13.201	99,99
Piyungan	13.604	13.601	99,98
Sewon	24.736	24.735	100,00
Kasihan	26.294	26.281	99,95
Sedayu	11.843	11.838	99,96
Total	233.766	233.729	99,98

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Peningkatan capaian menjadi 99,98 persen pada tahun 2025 ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan administratif, seperti adanya penduduk pindah datang dari luar Bantul yang sebelumnya belum mencatatkan akta kelahirannya. Kegiatan susur akta terus digalakkan secara berkesinambungan. Selain itu, peran sosialisasi kepada pamong kalurahan dan masyarakat juga sangat krusial dalam mendorong kepemilikan akta ini. Program inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu program "Situpat", juga sangat berdampak signifikan terhadap tingginya angka kepemilikan ini, di mana masyarakat yang baru saja melahirkan dapat langsung memperoleh empat layanan administrasi sekaligus: NIK, Akta Kelahiran, KK, dan KIA.

Berdasarkan tren kenaikan kepemilikan akta lahir anak per kapanewon, Kapanewon Kasihan menjadi salah satu wilayah dengan peningkatan paling signifikan, yakni dari 99,86 persen pada tahun 2024 menjadi 99,95 persen pada tahun 2025. Selain itu, Kapanewon Sedayu juga mencatatkan lonjakan kepemilikan yang sangat baik. Rincian perbandingan tren kenaikan persentase kepemilikan akta lahir anak dari tahun 2024 ke 2025 dapat dilihat secara lebih jelas pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Grafik Perubahan Persentase Kepemilikan Akta Lahir Anak (0-17 Tahun) di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan 2025

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pada tahun 2025, kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-5 tahun di Kabupaten Bantul tercatat telah mencapai tingkat paripurna, yakni 100 persen dari jumlah keseluruhan penduduk usia 0-5 tahun (sebanyak 50.843 anak). Kapanewon dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran absolut pada kelompok anak usia 0-5 tahun paling banyak adalah di Kapanewon Banguntapan, yakni mencapai 6.282 anak. Hal ini sejalan dengan tingginya jumlah populasi anak usia 0-5 tahun di wilayah Kapanewon Banguntapan tersebut. Apabila dilihat dari cakupan persentasenya, capaian pada tahun 2025 ini menunjukkan progres yang sangat baik, di mana seluruh wilayah (17 kapanewon) di Kabupaten Bantul telah berhasil meraih 100 persen kepemilikan akta kelahiran. Dengan demikian, pada

tahun ini sudah tidak ada lagi wilayah yang memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran di bawah 100 persen untuk kelompok anak usia 0-5 tahun.

Tabel 6.5 Kepemilikan Akta Lahir Anak Usia 0-5 tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Kepemilikan Akta Kelahiran		
	Jumlah Penduduk Usia 0-5 Tahun	Memiliki Akta Kelahiran	Persentase
Srandakan	1.440	1.440	100
Sanden	1.605	1.605	100
Kretek	1.522	1.522	100
Pundong	1.893	1.893	100
Bambanglipuro	2.003	2.003	100
Pandak	2.637	2.637	100
Pajangan	2.091	2.091	100
Bantul	3.360	3.360	100
Jetis	3.103	3.103	100
Imogiri	3.419	3.419	100
Dlingo	2.139	2.139	100
Banguntapan	6.282	6.282	100
Pleret	2.901	2.901	100
Piyungan	2.873	2.873	100
Sewon	5.209	5.209	100
Kasihan	5.763	5.763	100
Sedayu	2.603	2.603	100
Total	50.843	50.843	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

Kepemilikan akta kelahiran pada kelompok anak usia 0-1 tahun menunjukkan capaian yang sempurna di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2025, proporsi antara jumlah anak usia 0-1 tahun dan jumlah anak yang telah memiliki akta kelahiran telah mencapai 100 persen secara merata di seluruh kapanewon. Secara keseluruhan, dari total 8.079 jiwa anak usia 0-1 tahun di Kabupaten Bantul, seluruhnya telah tercatat secara sah memiliki dokumen akta kelahiran. Rincian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-1 tahun per kapanewon dapat dilihat pada Tabel 6.6 berikut.

Tabel 6.6 Kepemilikan Akta Lahir Anak Usia 0-1 tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Kepemilikan Akta Kelahiran		
	Jumlah Penduduk Usia 0-1 Tahun	Memiliki Akta Kelahiran	Persentase
Srandakan	233	233	100
Sanden	258	258	100
Kretek	259	259	100
Pundong	271	271	100
Bambanglipuro	328	328	100
Pandak	456	456	100
Pajangan	327	327	100
Bantul	498	498	100
Jetis	490	490	100
Imogiri	550	550	100
Dlingo	353	353	100
Banguntapan	987	987	100
Pleret	461	461	100
Piyungan	452	452	100
Sewon	802	802	100
Kasihan	900	900	100
Sedayu	454	454	100
Total	8.079	8.079	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

6.3.2 Akta Perkawinan

Kepemilikan akta perkawinan yang dihitung pada bagian ini adalah dokumen akta/buku perkawinan yang telah dicatatkan secara resmi di dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persentase kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Bantul diperoleh dari perbandingan antara penduduk yang mencatatkan buku/akta nikahnya di aplikasi SIAK dengan total penduduk berstatus kawin yang berusia 19 tahun ke atas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 6.7, diketahui bahwa persentase kepemilikan akta perkawinan yang tercatat di aplikasi SIAK pada tahun 2025 telah mencapai 92,13

persen dari total 500.645 penduduk yang berstatus wajib akta kawin. Berdasarkan sebaran wilayahnya, Kapanewon Jetis (94,18 persen) dan Kapanewon Kasihan (94,14 persen) merupakan kapanewon yang memiliki persentase kepemilikan akta perkawinan tercatat tertinggi di Kabupaten Bantul. Sebaliknya, Kapanewon Bambanglipuro (87,82 persen) dan Kapanewon Imogiri (87,96 persen) merupakan kapanewon dengan persentase kepemilikan akta perkawinan tercatat yang paling rendah.

Tabel 6.7 Persentase Kepemilikan Buku/Akta Perkawinan yang Dicatatkan di Aplikasi SIAK Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kapanewon	Kepemilikan Akta Perkawinan		
	Jumlah Penduduk Wajib Akta Kawin	Dicatatkan Di Aplikasi SIAK	Persentase
Srandakan	15.915	14.853	93,33
Sanden	16.720	15.306	91,54
Kretek	16.259	14.845	91,30
Pundong	19.149	17.386	90,79
Bambanglipuro	21.779	19.126	87,82
Pandak	27.369	25.684	93,84
Pajangan	20.130	18.856	93,67
Bantul	33.659	31.177	92,63
Jetis	30.565	28.785	94,18
Imogiri	34.148	30.038	87,96
Dlingo	22.861	20.987	91,80
Banguntapan	58.019	53.067	91,46
Pleret	25.135	23.477	93,40
Piyungan	28.042	25.401	90,58
Sewon	51.438	47.665	92,66
Kasihan	53.834	50.679	94,14
Sedayu	25.623	23.893	93,25
Total	500.645	461.225	92,13

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

6.3.3 Akta Perceraian

Kepemilikan akta perceraian pada bagian ini merujuk pada dokumen yang resmi tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persentasenya diperoleh dari perbandingan

antara jumlah penduduk yang mencatatkan akta perceraian dengan total wajib akta cerai (penduduk berstatus cerai hidup usia 19 tahun ke atas, sesuai UU No. 16 Tahun 2019).

Berdasarkan Tabel 6.8, persentase kepemilikan akta perceraian di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah sebesar 85,68 persen (sebanyak 15.443 dari 18.023 wajib akta cerai). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tingkat pencatatan pada tahun 2024 yang sempat mencapai 91,60 persen. Berdasarkan sebaran wilayahnya, tingkat kepemilikan akta perceraian tertinggi berada di Kapanewon Sanden (91,03 persen) dan Kasihan (88,50 persen). Sebaliknya, persentase paling rendah tercatat di Kapanewon Imogiri (77,33 persen) dan Srandakan (81,64 persen).

Tabel 6.8 Persentase Kepemilikan Buku/Akta Perceraian yang Dicatatkan di aplikasi SIAK Tahun 2025

Kapanewon	Kepemilikan Akta Perceraian		
	Jumlah Penduduk Wajib Akta Cerai	Dicatatkan Di Aplikasi SIAK	Persentase
Srandakan	523	427	81,64
Sanden	524	477	91,03
Kretek	472	413	87,50
Pundong	568	492	86,62
Bambanglipuro	645	547	84,81
Pandak	870	745	85,63
Pajangan	596	498	83,56
Bantul	1.234	1.058	85,74
Jetis	983	826	84,03
Imogiri	1.094	846	77,33
Dlingo	824	711	86,29
Banguntapan	2.382	2.081	87,36
Pleret	911	757	83,10
Piyungan	955	834	87,33
Sewon	2.109	1.794	85,06
Kasihan	2.426	2.147	88,50
Sedayu	907	790	87,10
Total	18.023	15.443	85,68

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2

7. PENUTUP

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bantul disusun untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi, dinamika, dan prospek kependudukan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Data utama yang digunakan dalam penyusunan profil ini bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang telah dikonsolidasi secara bersih oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan paparan analisis pada bab-bab sebelumnya, beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil antara lain:

1. Dari sisi kuantitas penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 mengalami tren kenaikan dari awal tahun. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester 2, jumlah penduduk mencapai 985.142 jiwa, atau bertambah sebanyak 4.873 jiwa dari data awal tahun (980.269 jiwa). Kenaikan ini utamanya dipengaruhi oleh dinamika kelahiran dan tingginya angka migrasi masuk ke sebagian besar kapanewon di wilayah Bantul.
2. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul mengalami eskalasi menjadi sekitar 1.925,20 jiwa per km² pada tahun 2025. Selain itu, distribusi penduduk tergolong belum merata karena konsentrasi populasi umumnya terpusat memadat pada wilayah-wilayah kapanewon yang memiliki karakteristik sebagai daerah perkotaan.
3. Dari sisi kepemilikan dokumen kependudukan, capaian di wilayah ini dapat dikategorikan sangat baik. Pada sektor kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun, tingkat ketercapaian secara paripurna 100 persen telah terwujud. Sementara itu, kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan dan akta kematian juga terus meningkat, meskipun pencatatan cerai sedikit menurun. Tingginya capaian ini

didukung oleh pelayanan berbasis *online* yang memudahkan masyarakat mengurus dokumen.

4. Dari sisi administrasi dan kualitas pelayanan, Kabupaten Bantul menunjukkan prestasi yang membanggakan. Berbagai inovasi program jemput bola yang digulirkan oleh Disdukcapil dinilai sangat efektif untuk mewujudkan masyarakat tertib dokumen kependudukan, serta telah diakui dengan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan kesimpulan dari dinamika permasalahan kependudukan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Meskipun secara umum angka kelahiran di Kabupaten Bantul tergolong terkendali, program pengendalian penduduk tetap harus terus digalakkan. Hal ini sangat krusial karena jumlah populasi yang besar rentan memicu lonjakan pertumbuhan penduduk jika tidak diimbangi pengendalian berkelanjutan.
2. Keberhasilan dalam meraih target maksimal kepemilikan akta kelahiran dan dokumen lainnya perlu dipertahankan. Sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan harus terus dilaksanakan. Upaya proaktif (jemput bola) dapat diperluas melalui kerja sama dengan pihak sekolah, kader PKK, organisasi kepemudaan kalurahan, hingga optimalisasi pelayanan mobil keliling.
3. Keakuratan data kependudukan tidak hanya bergantung pada pelaporan masyarakat, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas registrasi. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM hingga tingkat terbawah perlu diupayakan berkala melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan petugas registrasi tingkat kalurahan.